

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini disusun mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021.

Adapun fungsi dari dokumen ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kami berharap, dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat bermanfaat.

Pemalang, 10 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

TTD

Dr. AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660301 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 188.4/ 22 /TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pada Sekretariat Daerah yang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V PENUTUP

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 10 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

TTD

Dr. AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660103 199203 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB. I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	6
1.4    Sistematika Penulisan .....	7
BAB. II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1.    Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 .....	9
2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	56
2.3.    Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	63
2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	66
2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	99
BAB. III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	100
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	100
3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	105
3.3    Program dan Kegiatan .....	106
BAB. IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	138
BAB. V    PENUTUP .....	164
LAMPIRAN :    Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Pemalang berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. ....	166

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Kabupaten Pemalang .....	11
2. Tabel 2.2	Kegiatan Tahun 2019 dengan Pencapaian Kinerja melebihi 100 % dan kurang dari 80% .....	51
3. Tabel 2.3	Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 .....	55
4. Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	59
5. Tabel 2.5	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 .....	61
6. Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPDTahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang .....	68
7. Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. ....	99
8. Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang .....	113
9. Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 .....	139

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 188.4/ 22 /2020  
TENTANG : RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tindak lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang adapada Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) sebagai perencanaan yang bersifat tahunan dengan mendasarkan pada RKPD sebagai salah satu pedomannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan

tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini memasuki tahap keempat periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pematapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun keempat (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 – 2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2019 tentang, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang;
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2021, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan sekretariat daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD

Tahun 2021 guna mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk :

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua *stakeholders* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam padatahun 2021 dapat tercapai.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 adalah untuk :

- a. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama tahun 2021 bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Memberikan arah dan tujuan bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 guna mencapai tujuan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**  
Menyajikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.;
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
Menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Berisi program dan kegiatan beserta rencana kerja serta pendanaan perangkat daerah selama periode satu tahun.
- BAB V PENUTUP**  
Berisi ringkasan permasalahan yang dihadapi dan rencana solusi yang akan dilaksanakan kedepannya.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019**

**Anggaran Belanja** yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 46.001.613.000,00 (Empat puluh enam milyar delapan satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp. 43.427.838.739,00 (Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,41% dengan perincian :

##### **1. Belanja Tidak Langsung**

**Belanja Tidak Langsung** Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang serta Gaji dan Tunjangan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2019, Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 16.492.939.000,00 (Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 15.301.862.152,00 (Lima belas milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 92,77% dengan perincian :

##### **a. Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati**

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebesar Rp. 781.044.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta empat puluh empat ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 764.863.716,00 (Tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau sebesar 97,93%.

**b. Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan KPU**

Gaji dan Tunjangan PNS pada Sekretariat Daerah maupun Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 15.711.895.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar RP. 14.536.998.436,00 (Empat belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapanribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 92,52%.

**2. Belanja Langsung**

**Belanja Langsung** Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2019, Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 30.289.718.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belasribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 28.890.840.303,00 (Dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga rupiah) atau sebesar 95.38%.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Setda KabupatenPemalang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
4.08. 4.08.01	Sekretariat Daerah									
4.08. 4.08.01. 01.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	48	80%
4.08. 4.08.01. 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08. 4.08.01. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Jasa administrasi keuangan yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Jasa kebersihan kantor yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Peralatan rumah tangga yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Bahan logistik kantor yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Makanan dan minuman yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan.	Jasa keamanan yang tersedia setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.01.26	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS.	Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS yang tersedia setiap bulan.	0	0	0	0	0%	12	12	0%
<b>4.08.4.08.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dengan baik setiap bulannya.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah gedung yang dibangun.	1	1	0	0	0%	0	1	100%
4.08.4.08.01.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dibeli.	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4.08.4.08.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli.	20	12	5	5	100%	3	20	100%
4.08.4.08.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas.	Jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang dibeli.	29	21	6	6	100%	2	29	100%
4.08.4.08.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli.	36	30	3	3	100%	3	36	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas.	Jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang dibeli.	30	26	3	3	100%	1	30	100%
4.08.4.08.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jenis peralatan gedung kantor yang dibeli.	36	29	4	4	100%	3	36	100%
4.08.4.08.01.02.10	Pengadaan Mebelair.	Jenis mebelair yang dibeli.	21	15	4	4	100%	2	21	100%
4.08.4.08.01.02.11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya.	Jenis komputer dan perlengkapannya yang dibeli.	49	31	13	13	100%	5	49	100%
4.08.4.08.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan yang dilaksana nakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas yang dilaksana nakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dilaksana nakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan.	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan yang dilaksana kan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasio nal yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan /dinas yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08.4.08.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair.	Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
<b>4.08.4.08.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan PNS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Jenis pakaian dinas KDH / WKDH yang dibeli	20	12	4	4	100%	4	20	100%
4.08.4.08.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu.	Jenis pakaian khusus hari - hari tertentu yang dibeli.	15	9	3	3	100%	3	15	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.03.06	Fasilitasi Kelengkapan Pakaian Dinas.	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS yang dicetak	11.000	5.000,00	3.000	3.000	100%	3.000	11000	100%
<b>4.08.4.08.01.05.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan.	50	0	50	50	100%	0	50	100%
4.08.4.08.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/ diklat	54	20	18	18	100%	16	54	100%
4.08.4.08.01.05.04	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD.	Jumlah ASN dan pejabat fungsional pengadaan barang/jasa yang mengikuti seminar/workshop.	110	50	30	30	100%	30	110	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.05.05	Pengiriman Pegawai Pada Seminar Workshop Terkait Dengan Pelaksanaan Tupoksi	Jumlah ASN yang mengikuti seminar/lokakarya / workshop.	22	22	0	0	100%	0	22	100%
<b>4.08.4.08.01.06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</b>	<b>Persentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN).	Jumlah dokumen LKjIP dan PK Setda.	8	4	2	2	100	2	8	100%
4.08.4.08.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Setda yang disusun.	7	3	2	2	100%	2	7	100%
4.08.4.08.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Setda yang disusun.	8	4	2	2	100%	2	8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 06.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	Jumlah buku laporan capaian kinerja SKPD.	16	8	4	4	100%	4	16	100%
		Jumlah desk laporan target dan realisasi kegiatan APBD di Kab.Pemalang.	8	4	2	2	100%	2	8	100%
		Jumlah Rakor pengendalian kegiatan SKPD di Kab. Pemalang.	32	16	8	8	100%	8	32	100%
4.08. 4.08.01. 06.11	Pengendalian Pelaksanaan Hasil - hasil Pembangunan.	Jumlah laporan hasil - hasil pembangunan.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
		Jumlah PPKom dan PPHP yang mengikuti sosialisasi.	6	4	1	1	100%	1	6	100%
		Jumlah buku kemajuan pelaksanaan pembangunan.	3	1	1	1	100%	1	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 06.12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
		Jumlah kegiatan EKPPD yang dilaksanakan.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
		Jumlah kegiatan bintek penyusunan LPPD yang diselenggarakan.	4	2	1	1	100%	0	3	75%
4.08. 4.08.01. 06.13	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).	Perjanjian Kinerja Bupati, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan	12	6	3	3	100%	3	12	100%
		Jumlah dokumen LKJIP Pemerintah Kabupaten Pemalang yang disusun.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
		Pemantauan Capaian Kinerja Perangkat Daerah setiap bulan.	36	12	12	12	100%	12	36	100%
		Pendampingan peningkatan SAKIP.	9	3	4	4	100%	2	9	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.06.14	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pemalang yang tersusun.	2	0	0	0	0%	1	1	50%
4.08.4.08.01.06.15	Penyusunan memori serah terima jabatan Bupati/Wakil Bupati.	Jumlah Memori serah terima jabatan Bupati/Wakil Bupati yang tersusun.	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>4.08.4.08.01.09.</b>	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.09.01	Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD.	Jumlah dokumen data base Perencanaan SKPD yang disusun (Renstra dan Renja).	8	4	2	2	100%	2	8	100%
4.08.4.08.01.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun.	18	10	3	3	100%	4	18	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 09.03	Penyusunan Data Base Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tingkat Kabupaten.	Jumlah fasilitasi data RUP yang diupload di website portal pengadaan.	8	4	2	2	100%	2	8	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SIMPEL	100	60,4	0	0	100%	0	60,4	60%
		Jumlah sewa colocation/data center.	3	1	1	1	100%	1	3	100%
<b>4.08. 4.08.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap pelayanan KDH/ WKDH.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08. 4.08.01. 15.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.	Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat / organisasi sosial yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08. 4.08.01. 15.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 15.04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah yang dilaksanakan.	28	18	4	4	100%	6	28	100%
		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi bidang pemerintahan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08. 4.08.01. 15.05	Kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah.	Kegiatan kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08. 4.08.01. 15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.	Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%
4.08. 4.08.01. 15.09	Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah	Kegiatan penyelenggaraan protokoler kepala daerah yang dilaksanakan setiap bulan.	60	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 15.10	Penyusunan Materi Sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang disusun.	1.525	835	340	340	100%	350	1525	100%
		Jumlah buku katalog sambutan yang disusun.	60	20	20	20	100%	20	60	100%
4.08. 4.08.01. 15.54	Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum.	Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan.	12	0	0	0	0%	2	2	17%
4.08. 4.08.01. 15.55	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang.	Jumlah dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi.	1	0	0	0	0%	1	1	100%
4.08. 4.08.01. 15.56	Fasilitasi pelaksanaan pameran bidang pemerintahan.	Jumlah pelaksanaan pameran bidang pemerintahan.	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4.08. 4.08.01. 15.57	Penyusunan telaahan Bupati oleh Staf Ahli.	Jumlah telaahan Bupati oleh Staf Ahli yang tersusun.	30	0	10	10	100%	20	30	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 16.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 16.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja.	Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.08. 4.08.01. 16.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbub tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun.	3	2	1	1	100%	1	4	133%
4.08. 4.08.01. 16.37	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan BUMD.	Jumlah pemantauan , pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.	112	56	28	28	100%	28	112	100%
		Jumlah penyusunan raperda BUMD dan Analisis Investasi.	6	2	2	2	100%	2	6	100%
4.08. 4.08.01. 16.38	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro.	12	10	1	1	100%	1	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 16.39	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Pemantauan DBHCHT.	Jumlah kormonevlap DBHCHT yang dilaksanakan.	38	26	6	6	100%	6	38	100%
4.08. 4.08.01. 16.40	Kormonevlap Sarana dan Prasarana Perekonomian.	Jumlah kormonev koperasi dan UKM yang dilaksanakan.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.08. 4.08.01. 16.41	Koordinasi dan Pembinaan KP3 dan Pengembangan Aktivitas Agribisnis.	Jumlah pelaksanaan kormonevlap bidang PPTR.	24	12	6	6	100%	6	24	100%
		Jumlah pelaksanaan kormonevlap pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	18	6	6	6	100%	6	18	100%
		Jumlah pelaksanaan kormonevlap PPTR.	36	12	12	12	100%	12	36	100%
4.08. 4.08.01. 16.50	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	488	200	144	190	132%	144	534	109%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.16.51	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset /barang daerah yang dicetak.	160	40	40	40	100%	40	120	75%
4.08.4.08.01.16.52	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop tentang keuangan daerah.	96	40	12	12	100%	12	64	67%
<b>4.08.4.08.01.17.</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.17.06	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan.	Jumlah fasilitasi Unit Layanan Pengadaan barang /jasa pemerintah yang dilaksanakan.	539	339	100	100	100%	100	539	100%
		Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis pokja ULP.	100	50	25	25	100%	25	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah kegiatan pendampingan fasilitasi TP4D pada paket pekerjaan yang melalui tender.	14	0	8	0	0%	8	8	57%
4.08. 4.08.01. 19.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 19.04	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Tata Naskah Secara Elektronik	Persentase fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik pada Perangkat Daerah dalam 1 tahun.	500	300	100	100	100%	100	500	100%
4.08. 4.08.01. 20.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 20.02	Pembentukan Unit Bantuan Hukum	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara.	41	17	12	9	75%	12	38	93%
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.	26	6	4	0	0%	4	10	38%
4.08. 4.08.01. 20.06	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	52	19	12	12	100%	12	43	83%
		Jumlah legal opinion dalam satu tahun.	16	0	4	0	0%	4	4	25%
4.08. 4.08.01. 20.08	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam.	Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam.	48	24	12	12	100%	12	48	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.20.10	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan.	Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
<b>4.08.4.08.01.21.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Mou kerjasama antar daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.21.05	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti FGD.	300	180	60	120	200%	60	360	120%
4.08.4.08.01.21.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Jumlah sosialisasi/ Rakor Kerjasama Daerah.	2	2	0	0	100%	0	2	100%
4.08.4.08.01.21.07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah.	3	1	1	1	100%	1	3	100%
		Jumlah peserta monev kerjasama daerah.	100	0	60	60	100%	60	120	120%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.21.08	Penyusunan Regulasi Yang Mengatur Tentang Kerjasama Daerah	Jumlah draft raperbub/ raperda tentang kerjasama daerah yang disusun.	3	1	1	1	100%	1	3	100%
4.08.4.08.01.21.09	Penggalian/ Kajian Potensi Kerjasama Daerah	Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerjasama daerah yang didisusun.	3	1	1	1	100%	1	3	100%
4.08.4.08.01.21.10	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Jumlah koordinasi kerja sama wilayah perbatasan yang dilakukan.	12	4	4	4	100%	4	12	100%
4.08.4.08.01.21.11	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah yang dilakukan.	3	1	1	1	100%	1	3	100%
4.08.4.08.01.21.12	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Kerjasama Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah.	3	1	1	1	100%	1	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.21.13	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah.	38	8	15	23	153%	15	46	121%
<b>4.08.4.08.01.22.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>Persentase peraturan perundang undangan yang ditata</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08.4.08.01.22.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat tentang propemperda yang disusun dalam 1 tahun.	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.08.4.08.01.22.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di eksekutif.	93	70	10	10	100%	13	93	100%
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun.	90	64	10	16	160%	13	93	103%
		Jumlah sosialisasi rancangan produk hukum daerah.	10	4	3	3	100%	3	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah Kegiatan Forum Group Diskusi.	1	0	1	1	100%	1	2	200%
		Jumlah Raperbup tentang Implementasi pendidikan karakter anti korupsi.	1	0	1	1	0%	1	2	200%
4.08. 4.08.01. 22.04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.	140	84	28	28	100%	28	140	100%
4.08. 4.08.01. 22.05	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buku produk hukum yang dicetak.	20.000	2000	9.000	9.000	100%	9.000	20000	100%
		Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.	60	0	40	40	200%	40	80	133%
		Jumlah peserta uploading data publikasi pengelola jaringan JDIIH.	180	0	120	120	200%	120	240	133%
4.08. 4.08.01. 22.07	Penyusunan Kelengkapan Peraturan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan tentang kelembagaan yang disusun.	6	2	2	2	100%	2	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.22.10	Penyusunan Kelengkapan Peraturan Kelembagaan Pemerintah Daerah (EVALUASI SOTK).	Jumlah peraturan tentang kelembagaan yang disusun (Evaluasi SOTK).	21	21	0	0	0%	0	21	100%
4.08.4.08.01.22.14	Penyuluhan peraturan perundang - undangan	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun.	26	14	6	6	100%	6	26	100%
		Jumlah kelompok peserta lomba dalam penyuluhan hukum melalui metode permainan ular tangga.	46	18	14	14	100%	14	46	100%
4.08.4.08.01.22.16	Penyusunan Kelengkapan Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.	Jumlah Raperbup tentang ketatalaksanaan yang disusun.	9	5	2	2	100%	1	8	89%
4.08.4.08.01.22.18	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	3.828	2286	762	1117	147%	780	4183	109%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah buku regulasi menjawab.	1	0	1	1	0%	0	1	100%
4.08. 4.08.01. 22.19	Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	Jumlah kelompok peserta lomba kadarkum.	70	42	14	14	100%	14	70	100%
		Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk/ dibina.	26	14	6	6	100%	6	26	100%
		Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk.	70	42	14	0	100%	14	56	80%
		Jumlah kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi.	8	4	4	4	0%	0	8	100%
		Jumlah kelompok temu kader PKK se Kab. Pematang.	444	0	444	444	0%	0	444	100%
4.08. 4.08.01. 22.20	Fasilitasi Pemenuhan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM	375	225	75	75	100%	75	375	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.	18	10	4	4	100%	4	18	100%
		Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.08. 4.08.01. 22.27	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.	10	0	5	5	0%	5	10	100%
		Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi.	2.714	1514	600	600	100%	600	2714	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 23.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah.	Prosentase peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 23.05	Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro.	Jumlah Tarhim yang dilakukan.	39	29	5	5	100%	5	39	100%
		Jumlah rakor persiapan tarhim.	14	10	1	1	67%	1	12	86%
4.08. 4.08.01. 23.06	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan.	Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam yang dilakukan.	12	6	3	3	100%	3	12	100%
4.08. 4.08.01. 23.07	Fasilitasi kegiatan keagamaan.	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilakukan.	92	51	17	17	100%	24	92	100%
		Jumlah orang yang mengikuti lomba MTQ Tk. Nasional.	2	1	1	1	100%	0	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 23.08	Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompinda.	Jumlah petugas haji yang menjadi TPHD /TKHD.	23	12	6	6	100%	5	23	100%
		Jumlah forum silaturahmi Forkompinda yang diselenggarakan.	7	4	2	2	100%	1	7	100%
4.08. 4.08.01. 23.09	Fasilitasi kegiatan ibadah haji.	Jumlah armada bus untuk fasilitasi kegiatan haji.	63	31	16	16	100%	16	63	100%
		Jumlah fasilitasi makan minum pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.08. 4.08.01. 23.10	Penyusunan database lembaga keagamaan formal dan non formal.	Database lembaga keagamaan formal dan non formal yang disusun setiap bulan.	12	12	0	0	0%	0	12	100%
4.08. 4.08.01. 23.11	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.	Jumlah Ormas Keagamaan yang dibina dan difasilitasi kegiatannya.	12	9	0	0	100%	3	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.23.12	Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan.	Monitoring dan evaluasi program bansos keagamaan yang dilaksanakan setiap bulan.	36	24	0	0	100%	12	36	100%
4.08.4.08.01.23.13	Fasilitasi bansos/hibah keagamaan.	Fasilitasi administrasi pengurusan bansos/hibah keagamaan setiap bulan.	36	24	0	0	100%	12	36	100%
4.08.4.08.01.23.14	Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan.	Jumlah rakor kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.	11	6	3	3	100%	2	11	100%
4.08.4.08.01.23.15	Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan.	Jumlah sosialisasi di bidang sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.	7	3	2	2	100%	2	7	100%
4.08.4.08.01.23.16	Penyusunan database lembaga sosial kemasyarakatan.	Database lembaga sosial kemasyarakatan yang disusun setiap bulan.	12	12	0	0	0%	0	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.23.17	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.	8	6	0	0	100%	2	8	100%
4.08.4.08.01.23.18	Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan yang kegiatannya difasilitasi.	39	19	15	15	100%	5	39	100%
4.08.4.08.01.23.19	Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan.	Fasilitasi administrasi pengurusan bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan setiap bulan.	36	24	0	0	100%	12	36	100%
4.08.4.08.01.23.20	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan.	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan setiap bulan.	36	24	0	0	100%	12	36	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.23.21	Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.	Jumlah rakor bidang penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat yang dilakukan.	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.08.4.08.01.23.22	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK.	Jumlah ODMK yang dipantau.	300	200	100	100	100%	0	300	100%
		Jumlah rakor OMDK.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.08.4.08.01.23.24	Pembinaan eks psikotik.	Jumlah kegiatan family gethering yang dilaksanakan.	14	6	4	4	100%	4	14	100%
4.08.4.08.01.23.25	Penyusunan, penataan dan evaluasi database kemiskinan.	Penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun setiap bulan.	12	12	0	0	0%	0	12	100%
4.08.4.08.01.23.26	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah laporan monev penanggulangan kemiskinan.	4	2	1	1	100%	1	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
		Jumlah rakor money penanggulangan kemiskinan.	5	2	2	2	100%	1	5	100%
4.08. 4.08.01. 23.27	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan.	4	3	1	1	100%	1	5	125%
		Jumlah penyuluhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.	8	4	2	2	100%	2	8	100%
<b>4.08. 4.08.01. 24.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan</b>	<b>Persentase jumlah kecamatan yang dibina.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08. 4.08.01. 24.01	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dibina administrasinya pemerintahannya.	70	42	14	14	100%	14	70	100%
		Jumlah draft raperbup tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.	1	0	1	1	100%	0	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08.4.08.01.24.07	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang difasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	42	28	0	0	100%	14	42	100%
4.08.4.08.01.24.08	Penyusunan Buku Data Monografi Kecamatan	Jumlah buku data monografi Kecamatan yang disusun.	88	58	28	28	100%	28	114	130%
4.08.4.08.01.24.09	Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
4.08.4.08.01.24.10	Penyusunan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat	Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun	1	0	0	0	0%	1	1	100%
4.08.4.08.01.24.11	Rapat koordinasi forum kecamatan	Jumlah rakor forum kecamatan yang terselenggara	1	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 25.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Prosentase aparatur yang dibina.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 25.05	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen Sistem Informasi dalam Urusan Kepegawaian yang disusun	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4.08. 4.08.01. 25.06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah dokumen ANJAB, ABK, Evajab yang disusun.	12	6	1	1	100%	1	8	67%
4.08. 4.08.01. 25.21	Fasilitasi Urusan Kepegawaian	Persentase urusan kepegawaian yang tertangani.	400	200	100	100	100%	100	400	100%
		Profil kepegawaian Setda.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.08. 4.08.01. 25.28	Fasilitasi Urusan Kepegawaian Bagi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Jumlah pejabat fungsional pengadaan barang/jasa yang tersusun angka kreditnya.	40	20	10	10	100%	10	40	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 26.	Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi	Jumlah regulasi birokrasi yang disusun.	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 26.01	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dibentuk.	40	0	20	20	0%	20	40	100%
		Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK.	9	0	5	5	0%	4	9	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi.	180	60	60	120	200%	60	180	100%
		Tersusunnya aplikasi sistem evaluasi reformasi birokrasi.	1	0	1	1	100%	0	1	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan implementasi reformasi birokrasi.	60	0	60	60	0%	0	60	100%
		Pengelolaan aplikasi Reformasi Birokrasi.	1	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 26.02	Penyusunan Sistem dan Prosedure Kerja	Jumlah dokumen laporan evaluasi SOP	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.08. 4.08.01. 26.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di SKPD.	Jumlah dokumen SOP yang disusun.	6	4	1	1	100%	1	6	100%
<b>4.08. 4.08.01. 27.</b>	<b>Program pelayanan publik.</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.08. 4.08.01. 27.01	Standar pelayanan minimal.	Jumlah dokumen laporan evaluasi SPM.	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.08. 4.08.01. 27.03	Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah UPP yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat.	13	8	5	13	260%	0	21	162%
		Jumlah Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat	1	0	0	0	0%	1	1	100%
		Jumlah laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 27.11	Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik.	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dibina.	22	2	20	20	100%	0	22	100%
		Sosialisasi rencana pendirian Mall Pelayanan Publik.	2	0	2	2	100%	0	2	100%
		Jumlah kegiatan evaluasi penyusunan Standar Pelayanan Publik.	1	0	0	0	0%	1	1	100%
		Jumlah dokumen laporan Pembinaan Pelayanan Publik.	1	0	0	0	0%	1	1	100%
4.08. 4.08.01. 27.13	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan.	2	1	1	1	100%	1	3	150%
		Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang terfasilitasi penyusunannya.	6	0	6	6	100%	0	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 28.	Program Pengendalian Harga dan inflasi Daerah	Persentase tersedianya kebijakan pengendalian harga dan inflasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.08. 4.08.01. 28.03	Koordinasi Ekuinda, Pemantauan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah.	Jumlah pelaksanaan rakor dan kormonevlap ekuinda.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
		Jumlah rakor TPID pelaksanaan kormonev pengendalian invlasi daerah.	72	36	18	18	100%	18	72	100%
4.08. 4.08.01. 30.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase ketersediaan informasi rupabumi dan masing - masing wilayah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.08. 4.08.01. 30.08	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara.	350	210	70	20	29%	70	300	86%
		Jumlah rupabumi unsur budaya yang terdata.	10	0	10	14	140%	0	14	140%
		Jumlah kegiatan pelatihan pembakuan nama rupa bumi yang dilaksanakan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
		Jumlah papan batas wilayah Kecamatan yang tersedia.	18	0	8	8	100%	10	18	100%

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2019 termasuk sangat baik, mengingat banyak capaian realisasi kinerja mencapai 100%, dan ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya di atasnya. Berikut adalah kegiatan yang pencapaiannya di atas 100% dan beberapa yang di bawah 80%.

**Tabel 2.2**

**Kegiatan Tahun 2019 dengan Pencapaian Kinerja Melebihi 100 % dan Kurang dari 80 %**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR CAPAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	12	14	Penambahan realisasi mengikuti adanya penambahan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Tata Pemerintahan yaitu SPM dan LKPJ sehingga memerlukan koordinasi dan konsultasi yang lebih banyak dari target semula.
2	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta	144	190	Pencapaian kinerja yang melebihi target dikarenakan peserta yang semula adalah pejabat administrator dan pengawas, namun pada pelaksanaannya juga turut serta mengundang pelaksana.
3	Pembentukan Unit Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara	12	9	Kinerja yang lebih rendah dari target disebabkan tidak terdapat klaim bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
4	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Jumlah Peserta FGD	60	120	Pada pelaksanaan kegiatan, Perangkat Daerah yang pada awalnya hanya akan menghadirkan Jajaran Pimpinan Tinggi, namun juga turut menghadirkan Pejabat Administrator yaitu Sekretaris. Hal tersebut di dasarkan pada pertimbangan, Sekretaris selaku pejabat teknis yang pada waktunya juga akan diminta pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan.
5	Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Daerah	Jumlah draft dokumen kerja sama	15	23	Pencapaian yang melebihi target dikarenakan bertambahnya permintaan pembentukan kerja sama dari pihak mitra dimana hal tersebut melebihi usulan awal yang diajukan oleh OPD, serta terdapat satu dokumen kesepakatan yang melahirkan beberapa dokumen kerja sama.
6	Legislasi Rancangan Peraturan Perundangan	Jumlah Raperda menjadi Perda	10	16	Pencapaian kinerja melebihi dari target yang ditentukan karena terdapat luncuran pembahasan Raperda tahun lalu sejumlah enam buah.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
7	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi	762	1117	Pencapaian kinerja yang melebihi target dikarenakan ada pelaksanaan kegiatan Pilkadaes, sehingga diperlukan payung hukum berupa penyusunan Surat Keputusan Bupati.
8	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60	120	Penambahan jumlah peserta berasal dari keikutsertaan Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten, dengan harapan bisa memberikan saran dan masukan terkait perkembangan Reformasi Birokrasi pada tiap-tiap Perangkat Daerah
9	Fasilitasi Survey Kepuasan Publik	Jumlah UPP yang difasilitasi	5	13	Penambahan jumlah Unit Pelayanan Publik yang mendapatkan fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat didorong adanya penambahan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah

NO	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
10	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Pilar Batas Daerah terpelihara	70	20	Jumlah pilar batas yang dimiliki Kabupaten Pemalang hanya 20 buah, dan tidak ada penambahan. Setiap tahunnya dilaksanakan pemeliharaan terhadap pilar batas tersebut. Pencantuman target 70 buah merupakan kesalahan dalam penginputan target.
		Jumlah Rupa bumi unsur budaya terdata	10	14	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, terutama dalam pemanfaatan waktu dan biaya, serta metodologi, menyebabkan pencapaian kinerja dapat melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Selain hal tersebut di atas, Setda Kabupaten Pemalang juga memiliki capaian target IKK yaitu Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh, dimana kinerja tercapai sebesar 100% dan Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik yang tercapai sebesar 104%.

Secara ringkas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3****Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pemalang Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran ( Rp. )</b>	<b>Realisasi ( Rp. )</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>	<b>46.001.613.000,00</b>	<b>43.427.838.739,00</b>	<b>94,41</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>15.980.463.000,00</b>	<b>15.158.370.511,00</b>	<b>94,86</b>
	- Gaji dan Tunj. KDH / WKDH	781.044.000,00	764.178.576,00	97,84
	- Gaji dan Tunj. PNS Sekretariat	15.199.419.000,00	14.394.191.935,00	94,70
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>30.289.718.000,00</b>	<b>28.890.840.303,00</b>	<b>95,38</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Bagian :

1. Bagian Umum,
2. Bagian Organisasi,
3. Bagian Tata Pemerintahan,

4. Bagian Pembangunan,
5. Bagian Hukum,
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat,
7. Bagian Perekonomian dan SDA,
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Pemalang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan. Visi Bupati Pemalang periode 2016 – 2021 adalah **“Kabupaten Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera”**. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh ) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pematang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pematang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mendukung Misi keenam Bupati Pematang yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”**.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pematang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016 – 2021 serta merumuskan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang untuk meralisasikannya yaitu :

**Tujuan :**

“ Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif”.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;

7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

1. Nilai LPPD yang diperoleh;
2. Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh;
3. Nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh;
4. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik;
5. Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan;
6. Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi;
7. Persentase kegiatan/ paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi;
8. Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda;
9. Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah).

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang  
Tahun 2021**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Th.n-2)	Tahun 2020 (Th. n-1)	Tahun 2021 (Th. n)	Tahun 2022 (Th. n+1)	Tahun 2019 (Th. n-2)	Tahun 2020 (Th.n-1)	Tahun 2021 (Th. n)	Tahun 2022 (Th. n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai LPPD yang diperoleh.	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	
2.	Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh.	-	-	62	63	64	64	60,84	63	64	64	
3.	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh.	-	√	10	10	10	10	10,86	10,86	10,86	10,86	
4.	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik.	-	√	80,00	82,00	82,00	82,00	78,53	82,00	82,00	82,00	
5.	Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Th.n-2)	Tahun 2020 (Th. n-1)	Tahun 2021 (Th. n)	Tahun 2022 (Th. n+1)	Tahun 2019 (Th. n-2)	Tahun 2020 (Th.n-1)	Tahun 2021 (Th. n)	Tahun 2022 (Th. n+1)	
6.	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.	-	-	100%	100%	100%	100%	81,82%	100%	100%	100%	
7.	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.	-	-	2,60%	2,80%	3,00%	3,00%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	
8.	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.	-	-	85%	90%	90%	90%	85,71%	90%	90%	90%	
9.	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah)	-	-	6	7	8	8	13,97	13,97	13,97	13,97	

**Tabel 2.5**

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2016 - 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.	1. Nilai LPPD yang diperoleh.	Nilai	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.	2. Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh.	Nilai	50	55	60	62	63	64
	3. Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh.	Nilai	9	9	10	10	10	10
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Rata-rata skor survey kepuasan masyakat pada PD pelayanan publik.	Skor	76,00	75,31	78,00	80,00	82,00	82,00
4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	5. Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.	%	100	100	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	6. Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.	%	100	100	100	100	100	100
6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	7. Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.	%	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	8. Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.	%	70	75	80	85	90	90
8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investag baik;	9. Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah)	Rp.	3	4	5	6	7	8

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju *good governance* dan *clean government*. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah perlu meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan sumber daya aparatur daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kinerjanya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kesejahteraan aparatur daerah juga perlu diperhatikan. Diharapkan dengan diberlakukannya *reward and punishment*, yaitu pemberian penghargaan atau tambahan penghasilan bagi yang berprestasi atau yang memiliki beban kerja yang tinggi dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran, akan dapat meningkatkan kualitas pribadi aparatur dan kinerjanya.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.  
Masih terdapat kendala terkait proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan atensi dan komitmen bersama dalam proses penyelesaiannya, yang pemecahannya bisa melalui peningkatan kompetensi pejabat maupun panitia pengadaan maupun pengetahuan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh pengelola kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan upaya secara berkelanjutan dalam menginventarisasi dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga tidak mengganggu penyediaan layanan kepada masyarakat.
2. Belum sesuainya antara SOTK dan kodifikasi Permendagri 90 Tahun 2019, yang akan berpengaruh terhadap *cascading* dan proses bisnis perencanaan dan penganggaran.  
Menyikapi implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur jabatan pada perangkat daerah, sehingga diharapkan akan tercipta sebuah organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Belum optimalnya reformasi birokrasi.  
Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah yang menunjukkan belum terlaksananya dengan baik pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu upaya perbaikan terkait hal-hal tersebut harus terus dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya kerjasama antar daerah.  
Masih rendahnya jumlah kerjasama antar daerah yang ditempuh melalui proses legal formal merupakan permasalahan lain yang perlu disikapi bersama. Perangkat daerah perlu untuk didorong dalam melakukan inventarisir potensi kerjasama yang ada dalam naungannya, untuk

kemudian dilakukan proses legalisasi kerjasama tersebut. Oleh karena itu menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk terus mendorong perangkat daerah dalam menginventarisir semua potensi kerja sama dan selanjutnya menempuh tahapan legalisasi kerjasama tersebut sebagai bentuk tertib administrasi dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Diharapkan melalui kerjasama antar daerah akan menciptakan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

5. Belum seluruh perangkat daerah memiliki *Standar Operating Procedure (SOP)* untuk meningkatkan pelayanan.

Implementasi tugas pokok dan fungsi masih dianggap sebagai sebuah rutinitas dan tanpa didasari atas sebuah standar kerja. Hal ini bisa berakibat mengurangi efisiensi dan efektifitas kerja dan meningkatkan potensi terjadinya fraud. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya secara berkesinambungan untuk menyusun SOP pada setiap aktifitas di perangkat daerah yang menunjukkan alur kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu terhadap SOP yang sudah pernah disusun, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menentukan efisiensi dan efektifitas pekerjaan, mengingat pengetahuan dan tuntutan masyarakat yang seakin banyak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Belum semua Unit Kerja mendapatkan fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat sehingga diharapkan masing-masing Unit kerja melakukan SKM secara mandiri.

Pada tahun 2019 baru 87 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat, dan masih terdapat 500 lebih perangkat daerah yang belum melakukan survey tersebut. Hal ini perlu terus didorong baik melalui fasilitasi maupun pendampingan sehingga bisa diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dari layanan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi global yaitu wabah Covid 19, yang mengakibatkan dampak begitu besar dalam semua aspek kehidupan manusia. Pandemi ini juga tidak luput menimpa Kabupaten Pemalang. Atas hal tersebut, sedikit banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan mengingat terdapat pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang juga turut serta terkena dampak rasionalisasi anggaran, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja mengingat tugas utamanya adalah melakukan fungsi koordinatif. Seluruh indikator kinerja sasaran bisa dicapai melalui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan namun tetap berorientasi kepada pencapaian hasil dan kualitas pekerjaan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan sebagai media evaluasi atas rencana program dan kegiatan serta usulan pagu kegiatan dengan maksud untuk lebih mematangkan perencanaan. Review dilakukan dengan mempertimbangkan aspek isu strategis perangkat daerah, situasi dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap perangkat daerah, serta kebijakan pemerintah lainnya yang akan sangat berdampak terhadap operasionalisasi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Secara singkat review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan total pagu kegiatan sejumlah Rp. 1.501.110.000,00 yang berasal dari hasil analisa kebutuhan pada rancangan awal masih belum memenuhi kebutuhan.
2. Penambahan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Rp. 7.639.400.000,00 menjadi Rp. 8.552.000.000,00 atau bertambah sejumlah Rp. 912.600.000,00.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertambah sejumlah Rp. 105.000.000,00 dari usulan sejumlah Rp. 5.884.000.000,00 menjadi Rp. 5.989.000.000,00.
4. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah mengalami kenaikan usulan pagu sejumlah Rp. 600.000.000,00

yaitu dari usulan awal senilai Rp. 3.952.297.500,00 menjadi Rp. 4.552.297.500,00.

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah mengalami penurunan usulan sejumlah Rp. 29.340.000,00 yaitu dari Rp. 812.163.000,00 menjadi Rp. 782.823.000,00. Penurunan pagu karena terdapat satu kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
6. Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan mengalami penurunan usulan sebesar Rp. 36.300.000,00 yaitu dari Rp. 209.175.000,00 menjadi Rp. 172.875.000,00. Penurunan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan output bisa dipenuhi melalui kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah Penyusunan Regulasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Adapun Review terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>32.955.293.000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>34.456.403.000</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>7.639.400.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>8.552.000.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Umum	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100 %	330.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Umum	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Surat masuk ...buah Surat keluar .... buah	55.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Persentase pemenuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100 %	1.200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		1.430.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang tersedia setiap bulan	12 bulan	290.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	12 bulan	738.500.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bagian Umum	Jasa administrasi keuangan yang tersedia setiap bulan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bagian Umum	Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	12 bulan	1.007.000.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bagian Umum	Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor	100 %	645.900.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bagian Umum	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	100 %	165.900.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Bagian Umum	Persentase pemenuhan alat tulis kantor di lingkungan Setda	100 %	65.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	100 %	75.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Umum	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12 bulan	125.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Umum	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12 bulan	140.100.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Umum	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100 %	300.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bagian Umum	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100 %	300.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	625.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100 %	750.000.000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bagian Umum	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	50.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	12 bulan	100.000.000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Umum	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia setiap bulan	12 bulan	115.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Umum	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 bulan	185.000.000
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Bagian Umum	Bahan logistik kantor yang tersedia setiap bulan	12 bulan	55.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	12 bulan	75.000.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	Bagian Umum	Makanan dan minuman yang tersedia setiap bulan	12 bulan	1.400.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Bagian Umum	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 bulan	1.500.000.000
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Bagian Umum	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan setiap bulan	12 bulan	1.800.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Bagian Umum	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12 bulan	1.900.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Penyediaan Jasa Keamanan	Bagian Umum	Persentase pemenuhan jasa keamanan	100 %	500.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Bagian Umum	Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	12 bulan	42.000.000
17	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Bagian Umum	Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS yang tersedia setiap bulan	12 bulan	88.500.000	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Bagian Umum	Jumlah PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	12 bulan	88.500.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		-		<b>5.884.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		-		<b>5.989.000.000</b>
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibeli	3 unit	150.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	3 unit	150.000.000
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipenuhi	2 Jenis	360.000.000	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jenis dan jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli	2 jenis	360.000.000
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli		350.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		350.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jumlah peralatan rumah jabatan /dinas	2 Jenis	200.000.000	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	2 jenis	200.000.000
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bagian Umum	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2 Jenis	450.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2 Jenis	450.000.000
5	Pengadaan mebeleur	Bagian Umum	Jumlah mebeleur yang dibeli		105.000.000	Pengadaan mebeleur	Bagian Umum	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli		105.000.000
7	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Bagian Umum	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli		260.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Bagian Umum	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli		260.000.000
8	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Bagian Umum	Persentase pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	100 %	384.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Bagian Umum	Jumlah dan luas rumah jabatan yang diperlihara	100 %	384.000.000
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bagian Umum	Persentase pemeliharaan rutin rumah dinas		750.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bagian Umum	Jumlah dan luas rumah dinas yang diperlihara		750.000.000
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian Umum	Persentase pemeliharaan rutin gedung kantor		1.200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian Umum	Jumlah dan luas gedung kantor yang diperlihara		1.200.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bagian Umum	Jumlah jenis mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	12 bulan	225.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bagian Umum	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	12 bulan	300.000.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan secara berkala		890.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		890.000.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Persentase perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan		130.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jenis dan jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		130.000.000
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	Persentase perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	100 %	85.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 %	85.000.000
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Persentase peralatan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharannya secara rutin	100 %	75.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	100 %	75.000.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum	Persentase peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	200.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bagian Umum	Persentase mebelair yang dilakukan pemeliharannya secara rutin/berkala	100 %	70.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bagian Umum	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	100 %	100.000.000
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>580.000.000</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>580.000.000</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Umum	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	4 Jenis	330.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Umum	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	4 Jenis	330.000.000
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bagian Umum	Jumlah jenis pakaian KDH/WKDH yang dibeli	3 Jenis	150.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bagian Umum	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	3 Jenis	175.000.000
3	Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas	Bagian Organisasi	-	3.000 buah	75.000.000	Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas	Bagian Organisasi	Jumlah kelengkapan pakaian dinas yang disediakan	3.000 buah	75.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>100 %</b>	<b>285.750.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>100 %</b>	<b>285.750.000</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bagian Umum	jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/pelatihan	24 orang	100.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bagian Umum	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24 orang	100.000.000
2	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti Seminar/Workshop	25 orang	185.750.000	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	25 orang	185.750.000
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	100 %	1.247.980.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	100 %	1.247.980.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen	120.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	LKjIP 1 dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen	120.000.000
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Bagian Umum	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	9.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Bagian Umum	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	9.000.000
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bagian Umum	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun setda	1 dokumen	12.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bagian Umum	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	12.000.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD, Jumlah Desk Laporan Target dan Realisasi Kegiatan APBD (2 Kali), Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan SKPD (4 kali)	4 dokumen	265.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD, Jumlah Desk Laporan Target dan Realisasi Kegiatan APBD (2 Kali), Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan SKPD (4 kali)	4 dokumen	265.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil-hasil Pembangunan	1 laporan	260.000.000	Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil-hasil Pembangunan	1 laporan	260.000.000
6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang	1 dokumen	141.025.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang		141.025.000
7	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP)	Bagian Organisasi	Tersusunnya PK Bupati, RKT dan LKjIP	3 dokumen	262.000.000	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP)	Bagian Organisasi	Tersusunnya PK Bupati, RKT dan LKjIP	3 dokumen	262.000.000
			Tersusunnya IKU Kabupaten dan IKU OPD	1 dokumen				Tersusunnya IKU Kabupaten dan IKU OPD	1 dokumen	
8	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pemalang ATA 2020 yang tersusun	1 buah	178.955.000	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pemalang ATA 2020 yang tersusun	1 dokumen	178.955.000
VI	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.</b>	<b>100 %</b>	<b>320.000.000</b>	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.</b>	<b>100 %</b>	<b>320.000.000</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Renstra dan Renja OPD yang disusun	Renstra 1 dokumen Renja 2 dokumen	80.000.000	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Renstra dan Renja OPD yang disusun	Renstra 1 dokumen Renja 2 dokumen	80.000.000
2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Bagian Umum	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Bagian Umum	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	50.000.000
3	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan, Jumlah Sewa Colocation/Data Center (1 kali)	2 kali	190.000.000	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan, Jumlah Sewa Colocation/Data Center (1 kali)	2 kali	190.000.000
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100 %</b>	<b>3.952.297.500</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100 %</b>	<b>4.552.297.500</b>
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Bagian Umum	Persentase terlaksananya dialog/audiensi	100 %	160.000.000	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Bagian Umum	Persentase terlaksananya dialog/audiensi	100 %	160.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Bagian Umum	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan setiap bulan	12 bulan	280.000.000	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Bagian Umum	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan setiap bulan	12 bulan	480.000.000
3	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	6 kegiatan	283.590.000	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	6 kegiatan	283.590.000
4	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Bagian Umum	Jumlah kecamatan yang mendapat kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH	100 %	375.000.000	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Bagian Umum	Jumlah kecamatan yang mendapat kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH	100 %	375.000.000
5	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bagian Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	100 %	1.317.000.000	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bagian Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	100 %	1.317.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terdokumentasinya kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	1.400.000.000	Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terdokumentasinya kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	1.400.000.000
Terselenggaranya bintek keprotokolan dan pelayanan			1 kegiatan	Terselenggaranya bintek keprotokolan dan pelayanan				1 kegiatan		
Terselenggaranya pembinaan perangkat daerah			1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan perangkat daerah				1 kegiatan		
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi keprotokolan			40 orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi keprotokolan				40 orang		
Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan protokoler			100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan protokoler				100 %		
7	Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/Sekda	330 naskah	57.507.500	Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/Sekda	330 naskah	57.507.500

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan	12 permasalahan	56.300.000	Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan	12 permasalahan	56.300.000
9	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi	1 kegiatan	22.900.000	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi	1 kegiatan	22.900.000
10	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli	Bagian Umum			0	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli	Bagian Umum	Jumlah Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli yang tersusun	30 telaahan	400.000.000
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.581.335.000</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.581.335.000</b>
1	Penyusunan standar analisa belanja	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja yang tersusun	1 dokumen	315.000.000	Penyusunan standar analisa belanja	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja yang tersusun	1 dokumen	315.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyusunan standar satuan harga	Bagian Administrasi Pembangunan	Tersusunnya standar satuan harga Tahun 2020 dan Standar Satuan harga Perubahan 2019	1 dokumen	130.000.000	Penyusunan standar satuan harga	Bagian Administrasi Pembangunan	Tersusunnya standar satuan harga Tahun 2020 dan Standar Satuan harga Perubahan 2019	1 dokumen	130.000.000
3	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 dokumen	52.000.000	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 dokumen	52.000.000
4	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD	Bagian Perekonomian	Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD		270.845.000	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD	Bagian Perekonomian	Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD		270.845.000
5	Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	Bagian Perekonomian	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 Unit	37.330.000	Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	Bagian Perekonomian	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 Unit	37.330.000
6	Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Kormonevlap DBHCHT	6 kali	89.760.000	Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Kormonevlap DBHCHT	6 kali	89.760.000
7	Kormonevlap saranan dan prasarana perekonomian	Bagian Perekonomian	Jumlah Kormonevlap Koperasi dan UKM	12 kegiatan	100.450.000	Kormonevlap saranan dan prasarana perekonomian	Bagian Perekonomian	Jumlah Kormonevlap Koperasi dan UKM	12 kegiatan	100.450.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi Bidang PPTR	6 kegiatan	94.950.000	Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi Bidang PPTR	6 kegiatan	94.950.000
9	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Bagian Umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	145 orang	350.000.000	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Bagian Umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan	145 orang	350.000.000
10	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bagian Umum	Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset	40 buku	16.000.000	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bagian Umum	Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset	40 buku	16.000.000
11	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Bagian Umum	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	100 orang	125.000.000	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Bagian Umum	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	100 orang	125.000.000
<b>IX</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>		<b>Prosentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>		<b>Prosentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>
1	Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis pokja ULP	25 orang	600.000.000	Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis pokja ULP	25 orang	600.000.000
			Jumlah fasilitasi Unit Layanan Pengadaan barang /jasa pemerintah yang dilaksanakan	100 kegiatan					Jumlah fasilitasi Unit Layanan Pengadaan barang /jasa pemerintah yang dilaksanakan	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>535.000.000</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>535.000.000</b>
1	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Pemalang, Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.	12 bulan	400.000.000	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Pemalang, Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.	12 bulan	400.000.000
2	Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik	Bagian Organisasi	Tersedianya layanan TNDE	12 bulan	135.000.000	Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik	Bagian Organisasi	Tersedianya layanan TNDE	12 bulan	135.000.000
XI	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>		<b>Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	<b>771.367.500</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>		<b>Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	<b>771.367.500</b>
1	Pembentukan unit bantuan hukum	Bagian Hukum	Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang tertangani	6 perkara	385.000.000	Pembentukan unit bantuan hukum	Bagian Hukum	Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang tertangani	6 perkara	385.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Bagian Hukum	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani	14 kasus	225.000.000	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Bagian Hukum	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani	14 kasus	225.000.000
3	Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam	Bagian Perekonomian	Jumlah pelaksanaan Rakor, Monev dan Pelaporan dalam Perlindungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	12 Kali	83.267.500	Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam	Bagian Perekonomian	Jumlah pelaksanaan Rakor, Monev dan Pelaporan dalam Perlindungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	12 Kali	83.267.500
4	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor, Monev dan Pelaporan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	12 Kali	78.100.000	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor, Monev dan Pelaporan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	12 Kali	78.100.000
<b>XII</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah MOU kerjasama antar daerah</b>	<b>3 buah</b>	<b>812.163.000</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah MOU kerjasama antar daerah</b>	<b>3 buah</b>	<b>782.823.000</b>
1	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Bagian Organisasi	Terlaksananya FGD terkait pendayagunaan aparaturn daerah	60 peserta	179.625.000	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Bagian Organisasi	Terlaksananya FGD terkait pendayagunaan aparaturn daerah	60 peserta	179.625.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah	1 kali	45.240.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah	1 kali	45.240.000
3	Penyusunan Regulasi Yang Mengatur Tentang Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah draft raperbup/raperda tentang kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	59.802.000	Penyusunan Regulasi Yang Mengatur Tentang Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah draft raperbup/raperda tentang kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	59.802.000
4	Penggalian/ Kajian Potensi Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun	1 laporan	50.010.000	Penggalian/ Kajian Potensi Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun	1 laporan	50.010.000
5	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan	6 kali	118.110.000	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan	6 kali	118.110.000
6	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah	1 kali	54.216.000	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah	1 kali	54.216.000
7	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah	50 dokumen	275.820.000	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah	50 dokumen	275.820.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIII	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>Persentase peraturan perundang undangan yang ditata</b>	<b>100 %</b>	<b>3.245.000.000</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>Persentase peraturan perundang undangan yang ditata</b>	<b>100 %</b>	<b>3.245.000.000</b>
1	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah Propemperda yang tersusun	1 dokumen	105.000.000	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah Propemperda yang tersusun	1 dokumen	105.000.000
2	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah tersusunnya Pra Raperda menjadi Raperda, Raoerda menjadi Perda, dan pelaksanaan sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	20 dokumen	525.000.000	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah tersusunnya Pra Raperda menjadi Raperda, Raoerda menjadi Perda, dan pelaksanaan sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	20 dokumen	525.000.000
3	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	28 kegiatan	375.000.000	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	28 kegiatan	375.000.000
4	Publikasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah buku produk hukum yang dicetak dan dipublikasikanserta peserta uploating data publikasi JDIH	9000 buku	525.000.000	Publikasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah buku produk hukum yang dicetak dan dipublikasikanserta peserta uploating data publikasi JDIH	9000 buku	525.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyusunan Kelengkapan peraturan kelembagaan Pemerintah Daerah (Evaluasi SOTK)	Bagian Organisasi	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK).	2 buah	300.000.000	Pdenyusunan Kelengkapan peraturan kelembagaan Pemerintah Daerah (Evaluasi SOTK)	Bagian Organisasi	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK).	2 buah	300.000.000
6	Penyuluhan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa, Jumlah kelompok peserta lomba penyuluhan hukum melalui metode permainan ulat tangga dn kegiatan pendampngan fasilitasi TP4D	6 kegiatan	275.000.000	Penyuluhan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa, Jumlah kelompok peserta lomba penyuluhan hukum melalui metode permainan ulat tangga dn kegiatan pendampngan fasilitasi TP4D	6 kegiatan	275.000.000
7	Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Raperbup tentang ketatalaksanaan yang disusun	2 dokumen	200.000.000	Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Raperbup tentang ketatalaksanaan yang disusun	2 dokumen	200.000.000
8	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi	762 dokumen	290.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi	762 dokumen	290.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	Bagian Hukum	Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yang dibentuk, kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kabupaten Pemalang	14 peserta	260.000.000	Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	Bagian Hukum	Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yang dibentuk, kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kabupaten Pemalang	14 peserta	260.000.000
10	Fasilitasi Pemenuhan HAM	Bagian Hukum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun	75 orang	175.000.000	Fasilitasi Pemenuhan HAM	Bagian Hukum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun	75 orang	175.000.000
11	Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa.	Bagian Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi	600 kegiatan	215.000.000	Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa.	Bagian Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi	600 PHD	215.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIV	<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		<b>Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang termonitor dan terevaluasi.</b>	<b>100 %</b>	<b>3.420.000.000</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		<b>Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang termonitor dan terevaluasi.</b>	<b>100 %</b>	<b>3.420.000.000</b>
1	Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tarhim yang dilakukan	15 kegiatan	300.000.000	Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tarhim yang dilakukan	15 kegiatan	300.000.000
			Jumlah kegiatan rakor untuk FKUB dan persiapan tarhim.	6 kegiatan						
2	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peringatan hari besar islam yang dilakukan	6 kegiatan	170.000.000	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peringatan hari besar islam yang dilakukan	6 kegiatan	170.000.000
3	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pengajian dan MTQ yang dilakukan	30 kegiatan	665.000.000	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pengajian dan MTQ yang dilakukan	30 kegiatan	665.000.000
4	Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompimda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah petugas haji yang menjadi TPHD/TKHD terfasilitasi	6 orang	575.000.000	Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompimda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah petugas haji yang menjadi TPHD/TKHD terfasilitasi	6 orang	575.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Fasilitasi kegiatan ibadah haji	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah armada transportasi haji yang di sediakan dan jumlah kegiatan fasilitasi jamaah haji	16 unit	550.000.000	Fasilitasi kegiatan ibadah haji	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah armada transportasi haji yang di sediakan dan jumlah kegiatan fasilitasi jamaah haji	16 unit	550.000.000
7	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terbina dan terfasilitasinya lembaga/ormas keagamaan	3 kegiatan	70.000.000	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan yang dilakukan	3 kegiatan	70.000.000
8	Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	10 kegiatan	30.000.000	Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	10 kegiatan	30.000.000
9	Fasilitasi bansos/hibah keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah lembaga yang meminta rekomendasi bansos keagamaan yang difasilitasi/diterbitkan	10 Organisasi	30.000.000	Fasilitasi bansos/hibah keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah lembaga keagamaan yang terfasilitasi untuk mendapatkan bansos/hibah keagamaan	10 Organisasi	30.000.000
10	Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan	4 kegiatan	100.000.000	Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan	4 kegiatan	100.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sosialisasi kebijakan sosial di bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan.	2 kegiatan	50.000.000	Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sosialisasi kebijakan sosial di bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan.	2 kegiatan	50.000.000
13	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan yang dilakukan	4 kegiatan	70.000.000	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan yang dilakukan	4 kegiatan	70.000.000
14	Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan lembaga sosial keasyarakatan/organisasi yang difasilitasi.	10 Organisasi	100.000.000	Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan lembaga sosial keasyarakatan/organisasi yang difasilitasi.	10 Organisasi	100.000.000
15	Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah administrasi rekomendasi bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi/diterbitkan	10 Organisasi	30.000.000	Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi untuk mendapatkan bansos/hibah sosial	10 Organisasi	30.000.000
16	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah termonitor dan terevaluasinya kegiatan sosial kemasyarakatan	10 kegiatan	30.000.000	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan yang dilakukan	10 kegiatan	30.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat yang dilakukan	3 kegiatan	70.000.000	Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat yang dilakukan	3 kegiatan	70.000.000
18	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor ODMK yang dilakukan	4 kegiatan	80.000.000	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor ODMK yang dilakukan	4 kegiatan	80.000.000
19	Pembinaan eks psikotik	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan family gathering eks psikotik yang dilakukan	4 kegiatan	100.000.000	Pembinaan eks psikotik	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan family gathering eks psikotik yang dilakukan	4 kegiatan	100.000.000
21	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor monev penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	2 kegiatan	100.000.000	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rakor monev penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	2 kegiatan	100.000.000
22	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sosialisasi /penyuluhan dan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	4 kegiatan	300.000.000	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sosialisasi /penyuluhan dan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	4 kegiatan	300.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XV	<b>Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan</b>		<b>Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan.</b>	<b>100 %</b>	<b>209.175.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan</b>		<b>Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan.</b>	<b>100 %</b>	<b>172.875.000</b>
1	Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina	14 kecamatan	56.900.000	Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina	14 kecamatan	56.900.000
2	Fasilitasi Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang	4 laporan	26.900.000	Fasilitasi Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang	4 laporan	26.900.000
3	Penyusunan buku data monografi kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester	28 laporan	43.325.000	Penyusunan buku data monografi kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester	28 laporan	43.325.000
4	Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	1 kegiatan	45.750.000	Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	1 kegiatan	45.750.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyusunan Regulasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun		36.300.000	Penyusunan Regulasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun		0
<b>XVI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu</b>	<b>100 %</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu</b>	<b>100 %</b>	<b>400.000.000,00</b>
1	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Bagian Organisasi	-	1 dokumen	300.000.000	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Bagian Organisasi	Tersusunnya dokumen Anjab ABK	1 dokumen	300.000.000
2	Fasilitasi Urusan Kepegawaian	Bagian Umum	-	100 %	20.000.000	Fasilitasi Urusan Kepegawaian	Bagian Umum	presentase urusan kepegawaian yang tertangani	100 %	20.000.000
			-	1 dokumen				tersusunnya profil kepegawaian setda	1 dokumen	
3	Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun angka kreditnya	10 orang	80.000.000	Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun angka kreditnya	10 orang	80.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
XVII	<b>Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi</b>		<b>Jumlah regulasi birokrasi yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>585.000.000</b>	<b>Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi</b>		<b>Jumlah regulasi birokrasi yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>585.000.000</b>		
1	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 peserta	410.000.000	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 peserta	410.000.000		
			Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK	10 unit							Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK	10 unit
			Jumlah Kelompok budaya kerja yang terbentuk	27 kelompok							Jumlah Kelompok budaya kerja yang terbentuk	27 kelompok
2	Penyusunan sistem dan prosedur kerja	Bagian Organisasi	Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD.	1 laporan	100.000.000	Penyusunan sistem dan prosedur kerja	Bagian Organisasi	Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD.	1 laporan	100.000.000		
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur kerja di SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur kerja di SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	1 dokumen	75.000.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVIII	<b>Program Pelayanan Publik</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP</b>	<b>100 %</b>	<b>525.210.000</b>	<b>Program Pelayanan Publik</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP</b>	<b>100 %</b>	<b>525.210.000</b>
1	Standar Pelayanan Minimal	Bagian Tata Pemerintahan	Tersusunnya laporan evaluasi SPM	1 laporan	40.210.000	Standar Pelayanan Minimal	Bagian Tata Pemerintahan	Tersusunnya laporan evaluasi SPM	1 laporan	40.210.000
2	Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah unit pelayanan publik yang dibina	20 unit	90.000.000	Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah unit pelayanan publik yang dibina	20 unit	90.000.000
3	Fasilitasi survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah Unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat	7 unit	175.000.000	Fasilitasi survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah Unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat	7 unit	175.000.000
4	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya	8 dokumen	220.000.000	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya	8 dokumen	220.000.000
			Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan	1 kegiatan				Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan	1 kegiatan	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIX	<b>Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>152.650.000</b>	<b>Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>152.650.000</b>
1	Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA	4 kali	152.650.000	Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	Bagian Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA	4 kali	152.650.000
XX	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>		<b>Persentase ketersediaan informasi rupabumi dari masing-masing wilayah perbatasan</b>	<b>100 %</b>	<b>158.115.000</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>		<b>Persentase ketersediaan informasi rupabumi dari masing-masing wilayah perbatasan</b>	<b>100 %</b>	<b>158.115.000</b>
1	Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi	Bagian Tata Pemerintahan	Terpeliharanya pilar batas daerah	70 unit	158.115.000	Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi	Bagian Tata Pemerintahan	Terpeliharanya pilar batas daerah	20 unit	158.115.000

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 72 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah **“membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah”**.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut maka OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan atau menampung usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.7

### USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2021 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>N I H I L</b>			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, dimana didalamnya termuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015 -2019 dan memuat juga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2019-2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 9 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberrikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara persatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, dirumuskan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. RevolusiMental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### **3.1.2 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mencapai visi: "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", yang ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

### **3.1.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025**

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang yang maju, mandiri dan sejahtera sebagai landasan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang pada saat ini telah berada pada tahap ke-4 Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah pada tahap ke-4 ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah.
3. Mewujudkan tata pemerinthan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung penegakan supermasi hukum.

Adapun keselarasan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 :**

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial", dengan fokus pembangunan 2021 pada:

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

**b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2021 yang juga telah dilakukan penyesuaian yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Penguatan ketahanan bencana;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

**c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang :**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah **Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan**

**ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.** Hal ini merupakan bentuk implementatif dan adaptif kondisi terkini dari arah kebijakan 2021 dalam RPJMD yaitu *Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera*. Dimana pembangunan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu :
  - a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
  - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
- 2) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

- 4) Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sbb. :

**Tujuan :**

“Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif”.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;
7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.

### **3.3 Program dan kegiatan**

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang merupakan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang yang dilakukan melalui pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah serta RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pematang. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 program dan 131 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 34.456.403.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 9 (sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 6) Penyediaan alat tulis kantor.
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 10) Penyediaan peralatan rumah tangga.
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penyediaan bahan logistik kantor.
- 13) Penyediaan makanan dan minuman.
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah.
- 15) Penyediaan Jasa Keamanan.
- 16) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 17) Pengadaan kendaraan dinas / operasional.
- 18) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.
- 19) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 20) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.
- 21) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 22) Pengadaan mebeleur.
- 23) Pengadaan komputer dan perlengkapannya.
- 24) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- 25) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
- 26) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 27) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
- 28) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 29) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas.
- 30) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 31) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas.
- 32) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 33) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

## **3. Program peningkatan disiplin aparatur**

- 34) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 35) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 36) Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 37) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 38) Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD.

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- 39) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN).
- 40) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- 41) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- 42) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 43) Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan.
- 44) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 45) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP).
- 46) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

**6. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**

- 47) Penyusunan data base perencanaan SKPD.
- 48) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 49) Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten.

**7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**

- 50) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
- 51) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.
- 52) Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah.
- 53) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah.

- 54) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- 55) Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah.
- 56) Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- 57) Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum.
- 58) Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya.
- 59) Penyusunan telaahan Bupati oleh Staf Ahli.

**8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

- 60) Penyusunan analisa standar belanja.
- 61) Penyusunan standar satuan harga.
- 62) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- 63) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- 64) Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- 65) Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT.
- 66) Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian.
- 67) Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis.
- 68) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 69) Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
- 70) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

**9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota**

- 71) Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahan.

**10. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**

- 72) Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- 73) Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik.

**11. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**

- 74) Pembentukan unit bantuan hukum.
- 75) Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
- 76) Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam.
- 77) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.

**12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

- 78) Forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah.
- 79) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah.
- 80) Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- 81) Penggalan / kajian potensi kerjasama daerah.
- 82) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan.
- 83) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah.
- 84) Fasilitasi / pembentukan kerjasama daerah.

**13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- 85) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.
- 86) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.
- 87) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 88) Publikasi peraturan perundang-undangan.
- 89) Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK).
- 90) Penyuluhan peraturan perundang-undangan.
- 91) Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
- 92) Sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah.
- 93) Fasilitasi keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum.

- 94) Fasilitasi pemenuhan HAM.
- 95) Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa.

**14. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

- 96) Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro.
- 97) Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan.
- 98) Fasilitasi kegiatan keagamaan.
- 99) Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompimda.
- 100) Fasilitasi kegiatan ibadah haji.
- 101) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.
- 102) Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan.
- 103) Fasilitasi bansos/hibah keagamaan.
- 104) Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 105) Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan.
- 106) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.
- 107) Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan.
- 108) Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan.
- 109) Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan.
- 110) Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.
- 111) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK.
- 112) Pembinaan eks psikotik.
- 113) Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 114) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**15. Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan**

- 115) Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan.
- 116) Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
- 117) Penyusunan buku data monografi kecamatan.
- 118) Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan.
- 119) Penyusunan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

**16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

- 120) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS.
- 121) Fasilitasi Urusan Kepegawaian.
- 122) Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah.

**17. Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi**

- 123) Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi.
- 124) Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja.
- 125) Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di SKPD.

**18. Program Pelayanan Publik**

- 126) Standar Pelayanan Minimal.
- 127) Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik.
- 128) Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat.
- 129) Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik.

**19. Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah**

- 130) Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah.

**20. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**

- 131) Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi.

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 dan Perkiraan Maju tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sekretariat Daerah		Setda		34.456.403.000	APBD			36.179.223.150	
4	8		Sekretariat Daerah	Setda	34.456.403.000	APBD			36.179.223.150	
4	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.	Bag. Umum	100 %	8.552.000.000	APBD	100 %	8.979.600.000
4	8	1	1	Penyediaan jasa surat-menyurat.	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Bag. Umum	Surat masuk ....buah Surat keluar .... buah	55.000.000	APBD	57.750.000
4	8	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Bag. Umum		1.430.000.000	APBD	1.501.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	8	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Bag. Umum	12 bulan	738.500.000	APBD		12 bulan	775.425.000
4	8	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	Bag. Umum	12 bulan	1.007.000.000	APBD		12 bulan	1.057.350.000
4	8	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Bag. Umum	100 %	165.900.000	APBD			174.195.000
4	8	1	10	Penyediaan alat tulis kantor.	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	Bag. Umum	100 %	75.000.000	APBD			78.750.000
4	8	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	Bag. Umum	12 bulan	140.100.000	APBD		12 bulan	147.105.000
4	8	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Bag. Umum	100 %	300.000.000	APBD			315.000.000
4	8	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Bag. Umum	100 %	750.000.000	APBD			787.500.000
4	8	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Bag. Umum	12 bulan	100.000.000	APBD			105.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Bag. Umum	12 bulan	185.000.000	APBD		12 bulan	194.250.000
4	8	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor.	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	Bag. Umum	12 bulan	75.000.000	APBD		12 bulan	78.750.000
4	8	1	17	Penyediaan makanan dan minuman.	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Bag. Umum	12 bulan	1.500.000.000	APBD		12 bulan	1.575.000.000
4	8	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Bag. Umum	12 bulan	1.900.000.000	APBD		12 bulan	1.995.000.000
4	8	1	19	Penyediaan jasa keamanan.	Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	Bag. Umum	12 bulan	42.000.000	APBD			44.100.000
4	8	1	26	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS.	Jumlah non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	Bag. Umum	12 bulan	88.500.000	APBD		12 bulan	92.925.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prsarana perkantoran aparatur.</b>	<b>Bag. Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>5.989.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.288.450.000</b>
4	8	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Bag. Umum	3 unit	150.000.000	APBD		3 unit	157.500.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas.	Jenis dan jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli	Bag. Umum	2 Jenis	360.000.000	APBD		100 %	378.000.000
4	8	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Bag. Umum		350.000.000	APBD		100 %	367.500.000
4	8	2	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.	Jenis dan jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	Bag. Umum	2 Jenis	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
4	8	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Bag. Umum	2 Jenis	450.000.000	APBD		100 %	472.500.000
4	8	2	10	Pengadaan mebelair.	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli	Bag. Umum		105.000.000	APBD		100 %	110.250.000
4	8	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya.	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli	Bag. Umum		260.000.000	APBD		100 %	273.000.000
4	8	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.	Jumlah dan luas rumah jabatan yang diperlihara	Bag. Umum	100 %	384.000.000	APBD		100 %	403.200.000
4	8	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.	Jumlah dan luas rumah dinas yang diperlihara	Bag. Umum		750.000.000	APBD		100 %	787.500.000
4	8	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Jumlah dan luas gedung kantor yang diperlihara	Bag. Umum		1.200.000.000	APBD		100 %	1.260.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Bag. Umum	12 bulan	300.000.000	APBD		100 %	315.000.000
4	8	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bag. Umum		890.000.000	APBD		100 %	934.500.000
4	8	2	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas.	Jenis dan jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Bag. Umum		130.000.000	APBD		100 %	136.500.000
4	8	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bag. Umum	100 %	85.000.000	APBD		100 %	89.250.000
4	8	2	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas.	Jenis dan jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Bag. Umum	100 %	75.000.000	APBD		100 %	78.750.000
4	8	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bag. Umum	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
4	8	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	Bag. Umum	100 %	100.000.000	APBD		100 %	105.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	3		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>Bag. Umum Bag. Organisasi</b>	<b>100 %</b>	<b>580.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>609.000.000</b>
4	8	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas KDH/ WKDH yang dibeli.	Bag. Umum	4 Jenis	330.000.000	APBD		4 Jenis	346.500.000
4	8	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.	Jumlah jenis pakaian KDH/WKDH yang dibeli.	Bag. Umum	3 Jenis	175.000.000	APBD		3 Jenis	183.750.000
4	8	3	6	Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas.	Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas.	Bag. Organisasi	3000 buah	75.000.000	APBD		3000 buah	78.750.000
4	8	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Bag. Umum Bag. PBJ</b>	<b>100 %</b>	<b>285.750.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>300.037.500</b>
4	8	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bag. Umum	24 orang	100.000.000	APBD		24 orang	105.000.000
4	8	5	4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD.	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Bag. PBJ	25 orang	185.750.000	APBD		16 orang	195.037.500

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. Tapem Bag. Organisasi	100 %	1.247.980.000	APBD		100 %	1.310.379.000
4	8	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Bag. Adpemb	LKJIP 1 dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen	120.000.000	APBD		LKJIP 1 dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen	126.000.000
4	8	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	Bag. Umum	1 dokumen	9.000.000	APBD		1 dokumen.	9.450.000
4	8	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Bag. Umum	1 dokumen	12.000.000	APBD		1 dokumen	12.600.000
4	8	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD, Jumlah Desk Laporan Target dan Realisasi Kegiatan APBD (2 Kali), Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan SKPD (4 kali)	Bag. Adpemb	4 Dokumen	265.000.000	APBD		4 dokumen	278.250.000
4	8	6	11	Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan	Jumlah Laporan Hasil-hasil Pembangunan	Bag. Adpemb	1 laporan	260.000.000	APBD		1 laporan	273.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	6	12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang	Bag. Tapem	1 dokumen	141.025.000	APBD		1 dokumen	148.076.250
4	8	6	13	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	Tersusunnya PK Bupati, RKT dan LKjIP	Bag. Organisasi	3 dokumen	262.000.000	APBD		3 dokumen	275.100.000
					Tersusunnya IKU Kabupaten dan IKU OPD		1 dokumen				1 dokumen	
4	8	6	14	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pemalang ATA 2020 yang tersusun	Bag. Tapem	1 dokumen	178.955.000	APBD		1 dokumen	187.902.750
4	8	9		<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	<b>Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. PBJ</b>	<b>100 %</b>	<b>320.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>336.000.000</b>
4	8	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia renstra dan renja.	Bag. Adpemb	2 dokumen	80.000.000	APBD		2 dokumen.	84.000.000
4	8	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun.	Bag. Umum	4 dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	52.500.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	9	3	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten.	Jumlah Fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan, Jumlah Sewa Colocation/Data Center (1 kali)	Bag. PBJ	2 kali	190.000.000	APBD		2 kali	199.500.000
4	8	15		<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>Bag. Umum Bag. Tapem Bag. Prokompim</b>	<b>100 %</b>	<b>4.552.297.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>4.779.912.375</b>
4	8	15	1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Persentase terlaksananya dialog/ audiensi	Bag. Umum	100 %	160.000.000	APBD		100 %	168.000.000
4	8	15	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan setiap bulan	Bag. Umum	12 bulan	480.000.000	APBD		12 bulan	504.000.000
4	8	15	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Bag. Tapem	6 kegiatan	283.590.000	APBD		6 kegiatan	297.769.500
4	8	15	5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah kecamatan yang mendapat kunjungan kerja / inspeksi KDH/WKDH	Bag. Umum	100 %	375.000.000	APBD		100 %	393.750.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	15	6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	Bag. Umum	100 %	1.317.000.000	APBD		100 %	1.382.850.000
4	8	15	9	Penyelenggaraan Protokoler Kepala Daerah	Terdokumentasinya kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Bag. Prokompim	100 %	1.400.000.000	APBD		100 %	1.470.000.000
					Terselenggaranya bintek keprotokolan dan pelayanan		1 kegiatan				1 kegiatan	
					Terselenggaranya pembinaan perangkat daerah		1 kegiatan				1 kegiatan	
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi keprotokolan		40 orang				40 orang	
					Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan protokoler		100 %				100 %	
4	8	15	10	Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/Sekda	Bag. Prokompim	330 naskah	57.507.500	APBD		330 naskah	60.382.875
4	8	15	54	Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum	Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Bag. Tapem	12 permasalahan	56.300.000	APBD		12 permasalahan	59.115.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	15	55	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang	Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi	Bag. Tapem	1 kegiatan	22.900.000	APBD		1 kegiatan	24.045.000
4	8	15	57	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli	Jumlah Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli yang tersusun	Bag. Umum	30 telaahan	400.000.000	APBD		30 telaahan	420.000.000
4	8	16		<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. PBJ Bag. Perekonomian Bag. Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>1.581.335.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1.660.401.750</b>
4	8	16	1	Penyusunan analisa standar belanja.	Jumlah dokumen analisa standar belanja yang tersusun.	Bag. Adpemb	1 dokumen	315.000.000	APBD		1 dokumen	330.750.000
4	8	16	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga Tahun 2020 dan Standar Satuan harga Perubahan 2019	Bag. Adpemb	1 dokumen	130.000.000	APBD			136.500.000
4	8	16	4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun.	Bag. PBJ	1 perbup	52.000.000	APBD		1 perbup	54.600.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	16	37	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD.	Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD.	Bag. Perekonomian		270.845.000	APBD		12 kali	284.387.250
					Jumlah Penyusunan Raperda BUMD dan Analisis Investasi		-				-	
4	8	16	38	Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan.	Bag. Perekonomian	1unit	37.330.000	APBD		8 kali	39.196.500
4	8	16	39	Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT.	Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT.	Bag. Perekonomian	6 kali	89.760.000	APBD		6 kali	94.248.000
4	8	16	40	Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian.	Jumlah kormonev koperasi dan UKM.	Bag. Perekonomian	12kegiatan	100.450.000	APBD		12 kali	105.472.500
4	8	16	41	Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis.	Jumlah pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi bidang PPTR.	Bag. Perekonomian	6kegiatan	94.950.000	APBD		6 kali	99.697.500
					Jumlah Kormonevlap Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		-				3 kali	
4	8	16	50	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan.	Bag. Umum	145orang	350.000.000	APBD		-	367.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	8	16	51	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.	Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset.	Bag. Umum	40buku	16.000.000	APBD		100 %	16.800.000
4	8	16	52	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop.	Bag. Umum	100 orang	125.000.000	APBD		100 %	131.250.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Prosentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Bag. PBJ</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>630.000.000</b>
4	8	17	6	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.	Jumlah fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP. Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Pokja dan Sekretariat ULP	Bag. PBJ	100 kali 25 orang	600.000.000	APBD		100 kali 25 orang	630.000.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>19</b>		<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan</b>	<b>Bag. PBJ Bag. Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>535.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>561.750.000</b>
4	8	19	3	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kab. Pematang, Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.	Bag. PBJ	12 bulan	400.000.000	APBD		12 bulan	420.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	8	19	4	Fasilitasi pelayanan layanan tata naskah secara elektronik.	Tersedianya layanan TNDE.	Bag. Organisasi	12 bulan	135.000.000	APBD		12 bulan.	141.750.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>20</b>		<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>Bag. Hukum Bag. Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>771.367.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>809.935.875</b>
4	8	20	2	Pembentukan unit bantuan hukum.	Jumlah Perkara dan bantuan hukumbBagi masyarakat miskin yang tertangani.	Bag. Hukum	6 perkara	385.000.000	APBD		6 perkara	404.250.000
4	8	20	6	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani.	Bag. Hukum	14 kasus	225.000.000	APBD		14 permasalahan	236.250.000
4	8	20	8	Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam.	Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam.	Bag. Perekonomian	12 kali	83.267.500	APBD		12 kali	87.430.875
4	8	20	10	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.	Jumlah pelaksanaan rakor,monev dan pelaporan dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	Bag Perekonomian	12 kali	78.100.000	APBD		12 kali	82.005.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>21</b>		<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah MOU kerjasama antar daerah</b>	<b>Bag. Organisasi Bag. Tapem</b>	<b>3 unit</b>	<b>782.823.000</b>	<b>APBD</b>		<b>3 unit</b>	<b>821.964.150</b>

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	21	5	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Terlaksananya FGD terkait pendayagunaan aparatur daerah	Bag. Organisasi	60 peserta	179.625.000	APBD		60 peserta	188.606.250
4	8	21	7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah	Bag. Tapem	1 kali	45.240.000	APBD		1 kali	47.502.000
4	8	21	8	Penyusunan Regulasi Yang Mengatur Tentang Kerjasama Daerah	Jumlah draft raperbup/raperda tentang kerjasama daerah yang disusun	Bag. Tapem	1 dokumen	59.802.000	APBD		1 dokumen	62.792.100
4	8	21	9	Penggalian/ Kajian Potensi Kerjasama Daerah	Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun	Bag. Tapem	1 laporan	50.010.000	APBD		1 laporan	52.510.500
4	8	21	10	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Jjumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan	Bag. Tapem	6 kali	118.110.000	APBD		6 kali	124.015.500
4	8	21	12	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Kerjasama Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah	Bag. Tapem	1 kali	54.216.000	APBD		1 kali	56.926.800
4	8	21	13	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah	Bag. Tapem	50 dokumen	275.820.000	APBD		50 dokumen	289.611.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	22		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase tertatanya peraturan perundang - undangan.</b>	<b>Bag. Hukum Bag. Organisasi</b>	<b>100 %</b>	<b>3.245.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>3.407.250.000</b>
4	8	22	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.	Jumlah propemperda yang disusun.	Bag. Hukum	1 dokumen	105.000.000	APBD		1 dokumen	110.250.000
4	8	22	3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.	Jumlah praraperda menjadi raperda dan menjadi perda.	Bag. Hukum	20 perda	525.000.000	APBD		20 perda	551.250.000
4	8	22	4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah.	Bag. Hukum	28 sosialisasi	375.000.000	APBD		28 sosialisasi	393.750.000
4	8	22	5	Publikasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah buku produk hukum yang dicetak dan dipublikasikan serta peserta uploating data publikasi JDIH	Bag. Hukum	9.000 buku	525.000.000	APBD		9.000 buku	551.250.000
4	8	22	10	Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK).	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK).	Bag. Organisasi	2 buah	300.000.000	APBD		2 peraturan	315.000.000
4	8	22	14	Penyuluhan peraturan perundang-undangan.	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa.	Bag. Hukum	6 kegiatan	275.000.000	APBD		6 kegiatan	288.750.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	22	16	Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Jumlah Raperbub tentang ketatalaksanaan yang disusun	Bag. Organisasi	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	210.000.000
4	8	22	18	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.	Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	Bag. Hukum	762 Produk Hukum Daerah	290.000.000	APBD		50 Produk Hukum Daerah	304.500.000
4	8	22	19	Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum.	Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yang dibentuk, kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kabupaten Pemalang.	Bag. Hukum	14 kelompok	260.000.000	APBD		14 kelompok	273.000.000
4	8	22	20	Fasilitasi Pemenuhan HAM.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun.	Bag. Hukum	75 orang	175.000.000	APBD		75 peserta	183.750.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	22	27	Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa.	Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi	Bag. Hukum	600 dokumen	215.000.000	APBD		600 dokumen	225.750.000
4	8	23		<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang termonitor dan terevaluasi.</b>	Bag. Kesra	100%	3.420.000.000	APBD		100%	3.591.000.000
4	8	23	5	Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro.	Jumlah kegiatan rakor untuk FKUB dan persiapan tarhim.	Bag. Kesra	15 kegiatan	300.000.000	APBD		4 kegiatan	315.000.000
					Jumlah kegiatan tarawih silaturahmi forkompinda		6 kegiatan				15 kegiatan	
4	8	23	6	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan.	Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam.	Bag. Kesra	6 kegiatan	170.000.000	APBD		5 kegiatan	178.500.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	23	7	Fasilitasi kegiatan keagamaan.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, Kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi/ nasional.	Bag. Kesra	30 kegiatan	665.000.000	APBD		29 kegiatan	698.250.000
4	8	23	8	Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompinda.	Jumlah anggota tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah.	Bag. Kesra	6 orang	575.000.000	APBD		6 orang	603.750.000
4	8	23	9	Fasilitasi kegiatan ibadah haji.	Jumlah bus untuk fasilitasi transportasi jamaah haji.	Bag. Kesra	16 unit	550.000.000	APBD		16 bus	577.500.000
					Jumlah kegiatan fasilitasi operasional kegiatan jamaah haji non BPIH.		-				2 kegiatan	
4	8	23	11	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi/ lembaga keagamaan.	Bag. Kesra	3 kegiatan	70.000.000	APBD		4 kegiatan	73.500.000
4	8	23	12	Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi keagamaan.	Bag. Kesra	10 kegiatan	30.000.000	APBD		4 kegiatan	31.500.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	23	13	Fasilitasi bansos/hibah keagamaan.	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah keagamaan.	Bag. Kesra	10 Organisasi	30.000.000	APBD		6 dokumen	31.500.000
4	8	23	14	Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan rakor program dan kegiatan bidang sosial masyarakat.	Bag. Kesra	4 kegiatan	100.000.000	APBD		2 kegiatan	105.000.000
4	8	23	15	Sosialisasi kebijakan di bidang sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan bidang sosial masyarakat.	Bag. Kesra	2 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	52.500.000
4	8	23	17	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi sosial masyarakat.	Bag. Kesra	4 kegiatan	70.000.000	APBD		2 kegiatan	73.500.000
4	8	23	18	Fasilitasi penguatan lembaga sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan lembaga sosial masyarakat/organisasi yang difasilitasi.	Bag. Kesra	10 Organisasi	100.000.000	APBD		10 kegiatan	105.000.000
4	8	23	19	Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial masyarakat.	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah lembaga sosial masyarakat.	Bag. Kesra	10 Organisasi	30.000.000	APBD		6 dokumen	31.500.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	23	20	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bansos/ hibah pada lembaga sosial kemasyarakatan.	Bag. Kesra	10 kegiatan	30.000.000	APBD		4 kegiatan	31.500.000
4	8	23	21	Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.	Bag. Kesra	3 kegiatan	70.000.000	APBD		2 kegiatan	73.500.000
4	8	23	22	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK.	Jumlah kegiatan pelaksanaan rakor ODMK	Bag. Kesra	4 kegiatan	80.000.000	APBD		4 kegiatan	84.000.000
4	8	23	24	Pembinaan eks psikotik.	Jumlah kegiatan pembinaan/penyuluhan eks psikotik dan keluarganya (family gathering)..	Bag. Kesra	4 kegiatan	100.000.000	APBD		4 kegiatan	105.000.000
4	8	23	26	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah kegiatan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	Bag. Kesra	2 kegiatan	100.000.000	APBD		2 kegiatan	105.000.000
4	8	23	27	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah sosialisasi/ penyuluhan dan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	Bag. Kesra	4 kegiatan	300.000.000	APBD		4 kegiatan	315.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	24		Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan	Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan.	Bag. Tapem	100%	172.875.000	APBD		100%	181.518.750
4	8	24	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kecamatan	Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina	Bag. Tapem	14 kecamatan	56.900.000	APBD		14 kecamatan	59.745.000,00
4	8	24	7	Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang	Bag. Tapem	4 laporan	26.900.000	APBD		4 laporan	28.245.000,00
4	8	24	8	Penyusunan Buku Monografi Kecamatan	Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester	Bag. Tapem	28 laporan	43.325.000	APBD		28 laporan	45.491.250,00
4	8	24	9	Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	Bag. Tapem	1 kegiatan	45.750.000	APBD		1 kegiatan	48.037.500,00
4	8	24	10	Penyusunan Regulasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun	Bag. Tapem	0	0	APBD		0	0

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	25		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu	Bag. Organisasi Bag. Umum Bag. PBJ	100 %	400.000.000	APBD		100 %	420.000.000
4	8	25	6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS.	Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial, evaluasi analisis jabatan struktural, evaluasi jabatan fungsional umum yang tersusun.	Bag. Organisasi	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	315.000.000
4	8	25	21	Fasilitasi urusan kepegawaian.	Persentase urusan kepegawaian yang tertangani.	Bag. Umum	100 %	20.000.000	APBD		100 %	21.000.000
				Jumlah dokumen profil kepegawaian setda yang tersusun.	1 dokumen		1 dokumen					
4	8	25	28	Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun angka kreditnya	Bag. PBJ	10 orang	80.000.000	APBD		10 orang	84.000.000
4	8	26		Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi	Jumlah regulasi birokrasi yang disusun	Bag. Organisasi Bag. Adpemb	2 dokumen	585.000.000	APBD		2 dokumen	614.250.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	26	1	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Bag. Organisasi	60 peserta	410.000.000	APBD		60 peserta	430.500.000
					Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK		10 unit				10 unit	
					Jumlah Kelompok budaya kerja yang terbentuk		27 kelompok				27 kelompok	
4	8	26	2	Penyusunan sistem dan prosedur kerja	Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD.	Bag. Organisasi	1 laporan	100.000.000	APBD		1 laporan	105.000.000
4	8	26	4	Penyusunan Sistem dan Prosedur kerja di SKPD	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	Bag. Adpemb	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	78.750.000
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>27</b>		<b>Program Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP</b>	<b>Bag. Tapem Bag. Organisasi</b>	<b>100 %</b>	<b>525.210.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>551,470,500</b>
4	8	27	1	Standar Pelayanan Minimal	Tersusunnya laporan evaluasi SPM	Bag. Tapem	1 laporan	40.210.000	APBD		1 laporan	42,220,500
4	8	27	2	Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik	jumlah unit pelayanan publik yang dibina	Bag. Organisasi	20 unit	90.000.000	APBD		20 unit	94,500,000
4	8	27	3	Fasilitasi survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat	Bag. Organisasi	7 unit	175.000.000	APBD		7 unit	183,750,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8	27	4	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya	Bag. Organisasi	8 dokumen	220.000.000	APBD		8 dokumen	231,000,000
					Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan		1 kegiatan				1 kegiatan	
4	8	28		<b>Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>152.650.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>160.282.500</b>
4	8	28	3	Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah.	Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA	Bag. Perekonomian	12 kali	152.650.000	APBD		12 kali	160.282.500
					Jumlah Rakor TPID, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah.		-				18 kali	
4	8	30		<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi rupa bumi dari masing-masing wilayah perbatasan</b>	<b>Bag. Tapem</b>	<b>100 %</b>	<b>158.115.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>166,020,750</b>
4	8	30	8	Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi	Terpeliharanya pilar batas daerah	Bag. Tapem	20 unit	158.115.000	APBD		20 unit	166,020,750

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi target kinerja, Perangkat Daerah membutuhkan rencana kerja dan rencana pendanaan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman dan menjaga agar organisasi tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan pendanaan timbul sebagai dampak atas dilaksanakannya kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyusunan rencana kerja berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Berikut ini akan disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk Tahun Anggaran 2021 ( Tabel. 4.1 ).

Tabel 4.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif.			Indeks Reformasi Birokrasi.	65,00	34.456.403.000	65,00	36.179.223.150	Setda
		1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintah Daerah		Nilai LPPD yang diperoleh.	3,1	5.666.110.500	3,1	5.949.416.025	Bag. Umum Bag. Tapem Bag. Prokompim Bag. Organisasi
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH.	100 %	4.552.297.500	100 %	4.779.912.375	Bag. Umum Bag. Tapem
		1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Persentase terlaksananya dialog/ audiensi	100 %	160.000.000	100 %	168.000.000	Bag. Umum
		2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan setiap bulan	12 bulan	480.000.000	12 bulan	504.000.000	Bag. Umum



NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			7	Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/Sekda	330 naskah	57.507.500	330 naskah	60.382.875	Bag. Prokompim
			8	Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum	Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan	12 permasalahan	56.300.000	12 permasalahan	59.115.000	Bag. Tapem
			9	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang	Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi	1 kegiatan	22.900.000	1 kegiatan	24.045.000	Bag. Tapem
			10	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli	Jumlah Telaahan Kebijakan Bupati dan Staf Ahli yang tersusun	30 telaahan	400.000.000	30 telaahan	420.000.000	Bag. Umum
			<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.</b>		<b>Jumlah Mou Kerjasama antar daerah.</b>	<b>3 unit</b>	<b>782.823.000</b>	<b>3 unit</b>	<b>821.964.150</b>	<b>Bag. Organisasi Bag. Tapem</b>
			1	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Terlaksananya FGD terkait pendayagunaan aparatur daerah	60 peserta	179.625.000	60 peserta	188.606.250	Bag. Organisasi
			2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah	1 kali	45.240.000	1 kali	47.502.000	Bag. Tapem
			3	Penyusunan Regulasi Yang Mengatur Tentang Kerjasama Daerah	Jumlah draft raperbup/raperda tentang kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	59.802.000	1 dokumen	62.792.100	Bag. Tapem

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			4	Penggalian/ Kajian Potensi Kerjasama Daerah	Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun	1 laporan	50.010.000	1 laporan	52.510.500	Bag. Tapem
			5	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Jjumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan	6 kali	118.110.000	6 kali	124.015.500	Bag. Tapem
			6	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Kerjasama Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah	1 kali	54.216.000	1 kali	56.926.800	Bag. Tapem
			7	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah	50 dokumen	275.820.000	50 dokumen	289.611.000	Bag. Tapem
			<b>Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan.</b>		<b>Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan.</b>	<b>100%</b>	<b>172.875.000</b>	<b>100%</b>	<b>181.518.750</b>	<b>Bag. Tapem</b>
			1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kecamatan	Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina	14 kecamatan	56.900.000	14 kecamatan	59.745.000,00	Bag. Tapem
			2	Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang	4 laporan	26.900.000	4 laporan	28.245.000,00	Bag. Tapem

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
			3 Penyusunan Buku Monografi Kecamatan	Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester	28 laporan	43.325.000	28 laporan	45.491.250,00	Bag. Tapem
			4 Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan	1 kegiatan	45.750.000	1 kegiatan	48.037.500,00	Bag. Tapem
			<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi rupa bumi dari masing-masing wilayah perbatasan.</b>	<b>100%</b>	<b>158.115.000</b>	<b>100%</b>	<b>166.020.750</b>	<b>Bag. Tapem</b>
			1 Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi.	Terpeliharanya pilar batas daerah	20 unit	158.115.000	20 unit	166.020.750	Bag. Tapem
			<b>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh.</b>	<b>( 64 ) B</b>	<b>2.253.730.000</b>	<b>( 64 ) B</b>	<b>2.366.416.500</b>	<b>Bag. Tapem Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. Organisasi</b>
				<b>Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen laporan kinerja yang diperoleh.</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>100 %</b>	<b>285.750.000</b>	<b>100 %</b>	<b>300.037.500</b>	<b>Bag. Umum Bag. Adpemb Bag. Organisasi</b>
			1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24 orang	100.000.000	24 orang	105.000.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			2	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD.	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	25 orang	185.750.000	16 orang	195.037.500	Bag. PBJ
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</b>		<b>Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun</b>	<b>100 %</b>	<b>1.247.980.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.310.379.000</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. Tapem Bag. Organisasi</b>
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	LKjIP 1 dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen	120.000.000	LKjIP 1 dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dokumen	126.000.000	Bag. Adpemb
			2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen.	9.450.000	Bag. Umum
			3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.600.000	Bag. Umum
			4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD, Jumlah Desk Laporan Target dan Realisasi Kegiatan APBD (2 Kali), Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan SKPD (4 kali)	4 Dokumen	265.000.000	4 dokumen	278.250.000	Bag. Adpemb

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			5	Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan	Jumlah Laporan Hasil-hasil Pembangunan	1 laporan	260.000.000	1 laporan	273.000.000	Bag. Adpemb
			6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang	1 dokumen	141.025.000	1 dokumen	148.076.250	Bag. Tapem
			7	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	Tersusunnya PK Bupati, RKT dan LKJIP	3 dokumen	262.000.000	3 dokumen	275.100.000	Bag. Organisasi
				Tersusunnya IKU Kabupaten dan IKU OPD	1 dokumen	1 dokumen				
			8	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pemalang ATA 2020 yang tersusun	1 dokumen	178.955.000	1 dokumen	187.902.750	Bag. Tapem
			<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.</b>		<b>Persentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.</b>	<b>100 %</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>336.000.000</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. PBJ</b>
			1	Penyusunan data base perencanaan SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia renstra dan renja.	2 dokumen	80.000.000	2 dokumen.	84.000.000	Bag. Adpemb
			2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun.	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	52.500.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			3	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten.	Jumlah Fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan, Jumlah Sewa Colocation/Data Center (1 kali)	2 kali	190.000.000	2 kali	199.500.000	Bag. PBJ
			<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur.</b>		<b>Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu</b>	<b>100 %</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>420.000.000</b>	<b>Bag. Organisasi Bag. Umum Bag. PBJ</b>
			1	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS.	Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial, evaluasi analisis jabatan struktural, evaluasi jabatan fungsional umum yang tersusun.	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	315.000.000	Bag. Organisasi
			2	Fasilitasi urusan kepegawaian.	Persentase urusan kepegawaian yang tertangani.	100 %	20.000.000	100 %	21.000.000	-
					Jumlah dokumen profil kepegawaian setda yang tersusun.			1 dokumen		
			3	Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun angka kreditnya	10 orang	80.000.000	10 orang	84.000.000	Bag. PBJ

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
		<b>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik.</b>	<b>82</b>	<b>15.651.210.000</b>	<b>82</b>	<b>16.433.770.500</b>	<b>Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Adpemb</b>
			<b>Program pelayanan administrasi perkantoran.</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.</b>	<b>100 %</b>	<b>8.552.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>8.979.600.000</b>	<b>Bag. Umum</b>
			1 Penyediaan jasa surat-menyurat.	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Surat masuk ....buah  Surat keluar .... buah	55.000.000		57.750.000	Bag. Umum
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		1.430.000.000		1.501.500.000	Bag. Umum
			3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	12 bulan	738.500.000	12 bulan	775.425.000	Bag. Umum
			4 Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	12 bulan	1.007.000.000	12 bulan	1.057.350.000	Bag. Umum
			5 Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	100 %	165.900.000		174.195.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			6	Penyediaan alat tulis kantor.	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	100 %	75.000.000		78.750.000	Bag. Umum
			7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12 bulan	140.100.000	12 bulan	147.105.000	Bag. Umum
			8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	100 %	300.000.000		315.000.000	Bag. Umum
			9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100 %	750.000.000		787.500.000	Bag. Umum
			10	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	12 bulan	100.000.000		105.000.000	Bag. Umum
			11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 bulan	185.000.000	12 bulan	194.250.000	Bag. Umum
			12	Penyediaan bahan logistik kantor.	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	12 bulan	75.000.000	12 bulan	78.750.000	Bag. Umum
			13	Penyediaan makanan dan minuman.	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.575.000.000	Bag. Umum
			14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12 bulan	1.900.000.000	12 bulan	1.995.000.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			15	Penyediaan jasa keamanan.	Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	12 bulan	42.000.000		44.100.000	Bag. Umum
			16	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS.	Jumlah non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	12 bulan	88.500.000	12 bulan	92.925.000	Bag. Umum
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>		<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prsarana perkantoran aparatur.</b>	<b>100 %</b>	<b>5.989.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>6.288.450.000</b>	<b>Bag. Umum</b>
			1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	3 unit	150.000.000	3 unit	157.500.000	Bag. Umum
			2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas.	Jenis dan jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli	2 Jenis	360.000.000	100 %	378.000.000	Bag. Umum
			3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		350.000.000	100 %	367.500.000	Bag. Umum
			4	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.	Jenis dan jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	2 Jenis	200.000.000	100 %	210.000.000	Bag. Umum
			5	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2 Jenis	450.000.000	100 %	472.500.000	Bag. Umum
			6	Pengadaan mebelair.	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli		105.000.000	100 %	110.250.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
			7	Pengadaan komputer dan perlengkapannya.		260.000.000	100 %	273.000.000	Bag. Umum
			8	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.	100 %	384.000.000	100 %	403.200.000	Bag. Umum
			9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.		750.000.000	100 %	787.500.000	Bag. Umum
			10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.		1.200.000.000	100 %	1.260.000.000	Bag. Umum
			11	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.	12 bulan	300.000.000	100 %	315.000.000	Bag. Umum
			12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.		890.000.000	100 %	934.500.000	Bag. Umum
			13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas.		130.000.000	100 %	136.500.000	Bag. Umum
			14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	100 %	85.000.000	100 %	89.250.000	Bag. Umum
			15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas.	100 %	75.000.000	100 %	78.750.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	200.000.000	100 %	210.000.000	Bag. Umum
			17	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	100 %	100.000.000	100 %	105.000.000	Bag. Umum
			<b>Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.</b>		<b>Jumlah regulasi birokrasi yang disusun.</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>585.000.000</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>614.250.000</b>	<b>Bag. Organisasi Bag. Adpemb</b>
			1	Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 peserta	410.000.000	60 peserta	430.500.000	Bag. Organisasi
					jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK	10 unit		10 unit		
					jumlah Kelompok budaya kerja yang terbentuk	27 kelompok		27 kelompok		
			2	Penyusunan sistem dan prosedur kerja.	Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD.	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	Bag. Organisasi.
			3	Penyusunan sistem dan prosedur kerja di SKPD.	Jumlah dokumen SOP yang disusun.	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	78.750.000	Bag. Adpemb
			<b>Program pelayanan publik.</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP.</b>	<b>100 %</b>	<b>525.210.000</b>	<b>100 %</b>	<b>551.470.500</b>	<b>Bag. Organisasi Bag. Tapem</b>

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			1	Standar pelayanan minimal.	Jumlah laporan evaluasi SPM yang disusun.	1 laporan	40.210.000	2 laporan	42.220.500	Bag. Tapem
			2	Pembinaan lembaga pelayanan publik.	Jumlah unit pelayanan publik yang dibina.	20 unit	90.000.000	1 unit	94.500.000	Bag. Organisasi
			3	Fasilitasi sirvei kepuasan masyarakat.	Jumlah unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat	7 unit	175.000.000	-	183.750.000	Bag. Organisasi
			4	Fasilitasi inovasi pelayanan publik	Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya.	8 dokumen	220.000.000	8 kegiatan	231.000.000	Bag. Organisasi.
					Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan.	1 kegiatan		1 kegiatan		
			<b>4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.</b>		<b>Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.</b>	<b>100 %</b>	<b>1.115.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.170.750.000</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. Organisasi Bag. Umum</b>
			<b>Program peningkatan disiplin aparatur.</b>		<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN.</b>	<b>100 %</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>609.000.000</b>	<b>Bag. Umum Bag. Org.</b>
			1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas KDH/ WKDH yang dibeli.	4 Jenis	330.000.000	4 Jenis	346.500.000	Bag. Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.	Jumlah jenis pakaian KDH/WKDH yang dibeli.	3 Jenis	175.000.000	3 Jenis	183.750.000	Bag. Umum
			3	Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas.	Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas.	3000 buah	75.000.000	3000 buah	78.750.000	Bag. Organisasi
			<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan.</b>	<b>100%</b>	<b>535.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>561.750.000</b>	<b>Bag. PBJ Bag. Organisasi</b>
			1	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kab. Pemalang, Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.	12 bulan	400.000.000	12 bulan	420.000.000	Bag. PBJ
			2	Fasilitasi pelayanan layanan tata naskah secara elektronik.	Tersedianya layanan TNDE.	12 bulan	135.000.000	12 bulan.	141.750.000	Bag. Organisasi
			<b>5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama</b>		<b>Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi</b>	<b>100 %</b>	<b>3.420.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>3.591.000.000</b>	<b>Bag. Kesra</b>

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</b>	<b>Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan terevaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>3.420.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.591.000.000</b>	<b>Bag. Kesra.</b>
			1 Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro.	Jumlah kegiatan rakor untuk FKUB dan persiapan tarhim.	15 kegiatan	300.000.000	4 kegiatan	315.000.000	Bag. Kesra
				Jumlah kegiatan tarawih silaturahmi forkompinda	6 kegiatan		15 kegiatan		
			2 Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan.	Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam.	6 kegiatan	170.000.000	5 kegiatan	178.500.000	Bag. Kesra
			3 Fasilitasi kegiatan keagamaan.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, Kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi/ nasional.	30 kegiatan	665.000.000	29 kegiatan	698.250.000	Bag. Kesra
			4 Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompinda.	Jumlah anggota tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah.	6 orang	575.000.000	6 orang	603.750.000	Bag. Kesra

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			5	Fasilitasi kegiatan ibadah haji.	Jumlah bus untuk fasilitasi transportasi jamaah haji.	16 unit	550.000.000	16 bus	577.500.000	Bag. Kesra
					Jumlah kegiatan fasilitasi operasional kegiatan jamaah haji non BPIH.	-		2 kegiatan		
			6	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi/ lembaga keagamaan.	3 kegiatan	70.000.000	4 kegiatan	73.500.000	Bag. Kesra
			7	Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi keagamaan.	10 kegiatan	30.000.000	4 kegiatan	31.500.000	Bag. Kesra
			8	Fasilitasi bansos/hibah keagamaan.	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah keagamaan.	10 Organisasi	30.000.000	6 dokumen	31.500.000	Bag. Kesra
			9	Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan rakor program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan.	4 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	105.000.000	Bag. Kesra
			10	Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan.	2 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	52.500.000	Bag. Kesra

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			11	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi sosial kemasyarakatan.	4 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	73.500.000	Bag. Kesra
			12	Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan lembaga sosial keasyarakatan/organisasi yang difasilitasi.	10 Organisasi	100.000.000	10 kegiatan	105.000.000	Bag. Kesra
			13	Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan.	10 Organisasi	30.000.000	6 dokumen	31.500.000	Bag. Kesra
			14	Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah pada lembaga sosial kemasyarakatan.	10 kegiatan	30.000.000	4 kegiatan	31.500.000	Bag. Kesra
			15	Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat.	3 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	73.500.000	Bag. Kesra
			16	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK.	Jumlah kegiatan pelaksanaan rakor ODMK	4 kegiatan	80.000.000	4 kegiatan	84.000.000	Bag. Kesra

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			17	Pembinaan eks psikotik.	Jumlah kegiatan pembinaan/penyuluhan eks psikotik dan keluarganya (family gathering)..	4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	105.000.000	Bag. Kesra
			18	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah kegiatan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	105.000.000	Bag. Kesra
			19	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Jumlah sosialisasi/ penyuluhan dan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilakukan	4 kegiatan	300.000.000	4 kegiatan	315.000.000	Bag. Kesra
			<b>6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah</b>		<b>Persentase kegiatan /paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi</b>	<b>3,00 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>3,00 %</b>	<b>630.000.000</b>	<b>Bag. PBJ</b>
			<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.</b>		<b>Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>630.000.000</b>	<b>Bag. PBJ</b>
			1	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.	Jumlah fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP.	100 kali	600.000.000	100 kali	630.000.000	Bag. PBJ
					Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Pokja dan Sekretariat ULP	25 orang		25 orang		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
		7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	90 %	4.016.367.500	90 %	4.217.185.875	Bag. Hukum Bag. Tapem Bag. Perekonomian Bag. Organisasi
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100 %	771.367.500	100 %	809.935.875	Bag. Hukum Bag. Perekonomian
			1 Pembentukan unit bantuan hukum.	Jumlah Perkara dan bantuan hukumbBagi masyarakat miskin yang tertangani.	6 perkara	385.000.000	6 perkara	404.250.000	Bag. Hukum
			2 Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani.	14 kasus	225.000.000	14 permasalahan	236.250.000	Bag. Hukum
			3 Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam.	Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam.	12 kali	83.267.500	12 kali	87.430.875	Bag. Perekonomian
			4 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.	Jumlah pelaksanaan rakor,monev dan pelaporan dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	12 kali	78.100.000	12 kali	82.005.000	Bag. Perekonomian

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI
					2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Program penataan peraturan perundang-undangan.</b>	<b>Persentase tertatanya peraturan perundang - undangan.</b>	<b>100 %</b>	<b>3.245.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>3.407.250.000</b>	<b>Bag. Hukum, Bag. Organisasi</b>
			1 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.	Jumlah propemperda yang disusun.	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.250.000	Bag. Hukum
			2 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.	Jumlah praraperda menjadi raperda dan menjadi perda.	20 perda	525.000.000	20 perda	551.250.000	Bag. Hukum
			3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah.	28 sosialisasi	375.000.000	28 sosialisasi	393.750.000	Bag. Hukum
			4 Publikasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah buku produk hukum yang dicetak dan dipublikasikan serta peserta uploading data publikasi JDIIH	9.000 buku	525.000.000	9.000 buku	551.250.000	Bag. Hukum
			5 Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK).	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK).	2 buah	300.000.000	2 peraturan	315.000.000	Bag. Organisasi
			6 Penyuluhan peraturan perundang-undangan.	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa.	6 kegiatan	275.000.000	6 kegiatan	288.750.000	Bag. Hukum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			7	Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Jumlah Raperbub tentang ketatalaksanaan yang disusun	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	210.000.000	Bag. Organisasi
			8	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.	Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	762 Produk Hukum Daerah	290.000.000	50 Produk Hukum Daerah	304.500.000	Bag. Hukum
			9	Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum.	Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yang dibentuk, kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kabupaten Pematang.	14 kelompok	260.000.000	14 kelompok	273.000.000	Bag. Hukum
			10	Fasilitasi Pemenuhan HAM.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun.	75 orang	175.000.000	75 peserta	183.750.000	Bag. Hukum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			11	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Desa	Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi	600 dokumen	215.000.000	600 dokumen	225.750.000	Bag. Organisasi
			<b>8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik</b>		<b>Akumulasi laba perusaha per tahun (Milyar rupiah)</b>	<b>8</b>	<b>1.733.985.000</b>	<b>8</b>	<b>1.820.684.250</b>	<b>Bag. Perekonomian Bag. Adpemb Bag. Umum</b>
			<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.</b>		<b>Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah.</b>	<b>100 %</b>	<b>1.581.335.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.660.401.750</b>	<b>Bag. Adpemb Bag. Umum Bag. PBJ Bag. Perekonomian</b>
			1	Penyusunan analisa standar belanja.	Jumlah dokumen analisa standar belanja yang tersusun.	1 dokumen	315.000.000	1 dokumen	330.750.000	Bag. Adpemb
			2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga Tahun 2020 dan Standar Satuan harga Perubahan 2019	1 dokumen	130.000.000		136.500.000	Bag. Adpemb

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			3	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun.	1 perbup	52.000.000	1 perbup	54.600.000	Bag. PBJ
			4	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD.	Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD.		270.845.000	12 kali	284.387.250	Bag. Perekonomian
					Jumlah Penyusunan Raperda BUMD dan Analisis Investasi	-		-		
			5	Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan.	1unit	37.330.000	8 kali	39.196.500	Bag. Perekonomian
			6	Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT.	Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT.	6 kali	89.760.000	6 kali	94.248.000	Bag. Perekonomian
			7	Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian.	Jumlah kormonev koperasi dan UKM.	12kegiatan	100.450.000	12 kali	105.472.500	Bag. Perekonomian
			8	Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis.	Jumlah pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi bidang PPTR.	6kegiatan	94.950.000	6 kali	99.697.500	Bag. Perekonomian
					Jumlah Kormonevlap Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	-		3 kali		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 DAN 2022				LOKASI	
					2021		2022			
					Target	Rp	Target	Rp		
			9	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan.	145orang	350.000.000	-	367.500.000	Bag. Umum
			10	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.	Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset.	40buku	16.000.000	100 %	16.800.000	Bag. Umum
			11	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop.	100 orang	125.000.000	100 %	131.250.000	Bag. Umum
			<b>Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah.</b>		<b>Persentase pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>152.650.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.282.500</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>
			1	Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah.	Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA	12 kali	152.650.000	12 kali	160.282.500	Bag. Perekonomian
					Jumlah Rakor TPID, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah.	-		18 kali		
<b>Sekretariat Daerah</b>							<b>34.456.403.000</b>		<b>36.179.223.150</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021. Sebagaimana telah dicantumkan pada Bab II Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2021, terdapat dua buah kegiatan yang tidak dapat memenuhi pencapaian target kinerja yaitu Pembentukan Unit Bantuan Hukum dimana hanya tercapai 9 dari target 12 unit. Menyikapi hal tersebut sebagai upaya perbaikan kinerja, pengampu kegiatan dalam hal ini adalah Bagian Hukum terus melaksanakan sosialisasi keberadaan Unit Bantuan Hukum kepada masyarakat melalui forum resmi maupun tidak resmi. Diharapkan dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui maka semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kegiatan ini juga terkait dengan capaian SDGs Kabupaten Pemalang, sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan lain yang tidak mencapai target adalah Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi dimana berdasarkan target terdapat 70 unit pilar batas yang dipelihara namun berdasarkan capaian hanya 20 buah. Berdasarkan keterangan pengampu kegiatan yaitu Bagian Tata Pemerintahan, jumlah pilar batas yang dimiliki Kabupaten Pemalang adalah 20 unit, dan hal tersebut berarti semua pilar batas yang ada telah dipelihara. Pencantuman target sejumlah 70 unit merupakan murni unsur *human error* dalam proses penginputan. Kedepan akan dilakukan verifikasi lebih mendalam terkait pencantuman target kinerja kegiatan.

Pada Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya

disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021. Upaya antisipatif dan mengatasi permasalahan lainnya dilakukan dengan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas anggaran dengan tetap mengedepankan pencapaian output maupun *outcome* dari setiap program dan kegiatan. Selain itu, upaya pemilihan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan juga menjadi bagian dari strategi penyelesaian apabila terjadi ketidakcukupan penyediaan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
Dr. AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660301 199203 1 009

**LAMPIRAN**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021  
Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019**

**Unit Organisasi : Sekretariat Daerah**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp.) 2021</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>
1	2	3	4	5	6	7
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			50.875.615.300	DTU-DAU	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			50.875.615.300	DTU-DAU	Sekretariat Daerah
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			43.651.744.000	DTU-DAU	Bag. Umum Bag. Adpemb Bag. Organisasi Bag. Prokompim
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			151.220.000	DTU-DAU	Bag. Umum Bag. Adpemb
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia (RKA, RKAP, DPA, DPPA)	150 buku	50.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP Setda Kabupaten Pemalang yang disusun	1 dokumen	101.220.000	DTU-DAU	Bag. Adpemb

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	2 dokumen			
		Jumlah Dokumen Renja Setda Kabupaten Pemalang yang disusun	2 dokumen			
		Jumlah dokumen Renstra Setda Kabupaten Pemalang yang disusun	1 dokumen			
		Jumlah Dokumen SOP Setda Kabupaten Pemalang yang disusun	1 dokumen			
<b>4.01.01. 2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>23.578.619.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Setda	175 orang	23.507.619.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ferifikasi dokumen	10.000 dokumen	50.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya buku laporan akhir tahun sebelumnya	5 buku	12.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Tersusunnya dokumen penyusunan laporan keuangan tahun berjalan	5 dokumen			
4.01.01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen semesteran yang tersusun	4 buku	9.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.01. 2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			16.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah buku rkbmd yang tersedia	40 buku	16.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			795.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang dibeli	160 stell	200.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yg terfasilitasi urusan kepegawaian	150 orang	20.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	20 orang	475.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jmlah peserta yang mengituti Sosialisasi pengelolaan keu	140 orang			
4.01.01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 orang	100.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			3.035.100.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat alat listrik yang dibeli	200 unit	380.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah Perbaikan Intalasi Listrik KDH	1 paket			
4.01.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	12 paket	75.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan yang tersedia	25 jenis	100.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung pemadam	30 tabung	75.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan	4.400 cetakan	140.100.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah Penggandaan	85.000 lembar			
4.01.01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.500 exemplar	185.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah buku peraturan perundangan yang dibeli	5 buku			
4.01.01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	umlah kegiatan kunjungan tamu yang terfasilitasi	45 kegiatan	480.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah RAKor dan Konsultasi	1.000 kegiatan	1.600.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah telaah Bupati oleh Staf Ahli yang tersusun	30 telaahan			
<b>4.01.01. 2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.326.000.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 yg dibeli	4 unit	150.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler kursi yang dibeli	100 unit	466.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah HT	8 unit	710.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah Komputer	5 unit			
		Jumlah Laptop	4 unit			
		jumlah peralatan yang dibeli CCTV	12 unit			
<b>4.01.01. 2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4.155.000.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	3000 surat	55.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah surat Masuk	3000 surat			
4.01.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening sumber daya yang terbayar setiap bulannya	12 bulan	1.430.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan sewa layos, tratak, sound sistem	300 kegiatan	750.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM sound sistem	2 orang	1.920.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah SDM Tenaga Administrasi Umum	29 orang			
		Jumlah SDM Tenaga Driver	24 orang			
		Jumlah SDM Tenaga IT	10 orang			
		jumlah SDM tenaga keamanan (piket)	34 orang			
		Jumlah SDM Tenaga Kebersihan yang terbayar	29 orang			

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp.) 2021</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>
4.01.01. 2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3.685.000.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau jabatan yang terpelihara	6 unit	350.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara perijinannya	6 unit			
4.01.01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	162 unit	1.000.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		KIR	8 Unit			
		Perijinan kendraan operasional	162 unit			
4.01.01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah kursi yang dipelihara	100 unit	100.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah dan jenis gedung yang terpelihara	3.000 meter	1.950.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara, ac, tv, komputer	200 unit	285.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	50 unit			
4.01.01. 2.11.	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>578.818.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji KDH WKDH	2 orang	185.318.000	DTU-DAU	Bag. Umum

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian batik KDH/WKDH yang tersedia	50 pasang	305.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		jumlah pakaian dinas KDH WKDH yang tersedia	45 Stel			
4.01.01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perawatan Kesehatan KDH WKDH	8 orang	88.500.000	DTU-DAU	Bag. Umum
<b>4.01.01. 2.12.</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>			<b>3.841.000.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Umum</b>
4.01.01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam dan luar	1.000 kegiatan	1.913.500.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		jumlah kegiatan Kunjungan yang dilaksanakan	1.000 kegiatan			
		Jumlah makanan dan minuman yg tersedia	2.500 dus			
		Jumlah Peralatan Rumah Jabatan /dinas yg terbeli	20 unit			
4.01.01. 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2.500 dus	1.027.500.000	DTU-DAU	Bag. Umum
4.01.01. 2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah makanan	20.000 porsi	900.000.000	DTU-DAU	Bag. Umum
		Jumlah Snack yang tersedia	20.000 dus			

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp.) 2021</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Lokasi</b>
<b>4.01.01. 2.13.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>1.565.212.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Organisasi</b>
4.01.01. 2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Anjab, ABK dan Evajab	2 Dokumen	425.469.000	DTU-DAU	Bag. Organisasi
		Dokumen Kelembagaan	2 Dokumen			
4.01.01. 2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen PPTL	2 Dokumen	382.103.000	DTU-DAU	Bag. Organisasi
4.01.01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1 Dokumen	187.768.500	DTU-DAU	Bag. Organisasi
4.01.01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen PPTL	1 Dokumen	382.103.000	DTU-DAU	Bag. Organisasi
4.01.01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	187.768.500	DTU-DAU	Bag. Organisasi
<b>4.01.01. 2.14.</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>924.775.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Prokompim</b>
4.01.01. 2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH Yang Terfasilitasi	350 kegiatan	329.975.000	DTU-DAU	Bag. Prokompim
4.01.01. 2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Buku Katalog Sambutan Pimpinan Yang Tersusun	20 buku	221.120.000	DTU-DAU	Bag. Prokompim
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Oleh Pimpinan Yang Terselenggara	7 kegiatan			
		Jumlah Materi Sambutan Pimpinan Yang Tersusun	350 naskah			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.01. 2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH Yang Terdokumentasi	350 kegiatan	373.680.000	DTU-DAU	Bag. Prokompim
<b>4.01.02.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>5.133.266.550</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Tapem Bag. Kesra Bag. Hukum</b>
<b>4.01.02. 2.01.</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			<b>610.335.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Tapem</b>
4.01.02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya rakor dinas pejabat pemerintah daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pematang	8 kali	158.000.000	DTU-DAU	Bag. Tapem
4.01.02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PATEN, Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan, pembinaan dan pengawasan desa, terpeliharanya pilar batas daerah dan tersedianya data monografi kecamatan semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021	12 bulan	225.985.000	DTU-DAU	Bag. Tapem
4.01.02. 2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya LPPD, LKPJ dan SPM	3 dokumen	226.350.000	DTU-DAU	Bag. Tapem
<b>4.01.02. 2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>2.265.266.550</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Kesra</b>
4.01.02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi akomodasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah	2 kegiatan	1.750.266.550	DTU-DAU	Bag. Kesra
		Jumlah kegiatan monev keagamaan	1 kegiatan			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
		Jumlah kegiatan tarawih dan silaturahmi	15 kegiatan			
		Jumlah lembaga keagamaan yang dibina	1 kegiatan			
		Jumlah MTQ yang dilaksanakan	17 kegiatan			
		Jumlah Pengajian Rutin, Istighozah dan Pengajian PKK	25 kegiatan			
		Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) antara lain, Isro Mi''raj, Nuzulul Qur''an, Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah	6 kegiatan			
		Jumlah TPHD/TKHD yang difasilitasi	6 orang			
4.01.02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Monev hibah/bansos	2 kegiatan	250.000.000	DTU-DAU	Bag. Kesra
		Jumlah pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan	2 kegiatan			
		Jumlah rakor kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial.	4 kegiatan			
		Jumlah sosialisasi sosial kemasyarakatan	2 kegiatan			
4.01.02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah monev penanggulangan kemiskinan	1 kegiatan	265.000.000	DTU-DAU	Bag. Kesra
		Jumlah monitoring dan pembinaan keluarga eks psikotikatan	1 kegiatan			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan.	2 kegiatan			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.02. 2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.888.000.000	DTU-DAU	Bag. Hukum
4.01.02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di eksekutif	20 Raperda	480.000.000	DTU-DAU	Bag. Hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi	780 produk hukum			
		Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2022)	1 Surat Bupati			
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun	20 Perda			
		Jumlah sosialisasi rancangan produk hukum daerah	3 Sosialisasi daerah			
4.01.02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk	14 desa	625.000.000	DTU-DAU	Bag. Hukum
		Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk/ dibina	6 kelompok			
		Jumlah kelompok peserta lomba kadarkum	14 kelompok			
		Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun	1 laporan			
		Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun	3 laporan			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
		Jumlah legal opinion dalam satu tahun	4 LO			
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	12 permasalahan			
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM	75 orang			
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara	6 perkara			
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin	8 perkara			
4.01.02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Buku Referensi	20 buku	783.000.000	DTU-DAU	Bag. Hukum
		Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak	9000 buku			
		Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun	6 kegiatan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun	28 sosialisasi			
		Jumlah kelompok peserta lomba dalam penyuluhan hukum	14 kelompok			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji	5 produk hukum			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
		Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	40 buku			
		Pameran JDIH	1 kegiatan			
		Rakor JDIH Tingkat Kabupaten	2 kegiatan			
		Sosialisasi JDIH untuk Desa	4 sosialisasi			
<b>4.01.02. 2.04.</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>			<b>369.665.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Tapem</b>
4.01.02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOu Kerjasama antar Daerah, dokumen potensi kerjasama dan jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah daerah yang dilaksanakan	12 bulan	339.665.000	DTU-DAU	Bag. Tapem
4.01.02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	12 bulan	30.000.000	DTU-DAU	Bag. Tapem
<b>4.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>2.090.604.750</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Perekonomian Bag. Adpemb Bag. PBJ</b>
<b>4.01.03. 2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			<b>585.419.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>
4.01.03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pemantauan terhadap BUMD dan BLUD	14 kali	270.845.000	DTU-DAU	Bag. Perekonomian

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan kormonevlap DBHCHT	12 kali	218.169.000	DTU-DAU	Bag. Perekonomian
		Jumlah pelaksanaan Rakor Ekuinda dan pelaksanaan kormonevlap Ekuinda	6 kali			
		Jumlah pelaksanaan Rakor TPID dan pelaksanaan Kormonevlap TPID	6 kali			
4.01.03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM	6 kali	96.405.000	DTU-DAU	Bag. Perekonomian
<b>4.01.03. 2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			<b>393.500.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Adpemb</b>
4.01.03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Standarisasi Harga (SSH) yang tersusun	2 dokumen	240.000.000	DTU-DAU	Bag. Adpemb
		Jumlah subkegiatan yang tersusun ASB nya	8 subkegiatan			
4.01.03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase paket pekerjaan fisik yang dimonitoring	100 persen	52.000.000	DTU-DAU	Bag. Adpemb
4.01.03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang tersusun	4 buah	101.500.000	DTU-DAU	Bag. Adpemb
<b>4.01.03. 2.03.</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>881.000.000</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. PBJ</b>
4.01.03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah	100 kali kegiatan	550.000.000	DTU-DAU	Bag. PBJ

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.) 2021	Sumber Dana	Lokasi
4.01.03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah kegiatan yang terdata di SIRUP	2 Kali Kegiatan	250.000.000	DTU-DAU	Bag. PBJ
		Jumlah paket pengadaan yang difasilitasi LPSE	100 Paket			
		Jumlah penyediaan layanan jaringan LPSE	12 Bulan			
		Jumlah sewa colocation	2 paket			
4.01.03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang tersusun angka kreditnya	15 orang	81.000.000	DTU-DAU	Bag. PBJ
		Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti pelatihan	15 Orang			
<b>4.01.03. 2.04.</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>			<b>230.685.750</b>	<b>DTU-DAU</b>	<b>Bag. Perekonomian</b>
4.01.03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kormpnevlap KP3 dan PPTR	12 kali	85.455.000	DTU-DAU	Bag. Perekonomian
4.01.03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap perlindungan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam	12 kali	74.940.750	DTU-DAU	Bag. Perekonomian
4.01.03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	12 kali	70.290.000	DTU-DAU	Bag. Perekonomian